

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)
DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

(Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

WISNU ANDRIANTO

NIM: 0810313153



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

MOTTO

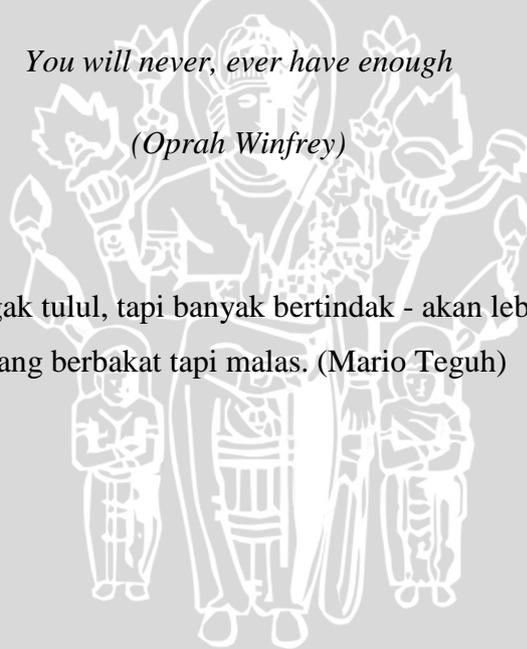
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha, maka hendaklah kalian berusaha (HR. Thabrani)

*Be thankful for what you have
you'll end up having more*

If you concentrate on what you don't have

*You will never, ever have enough
(Oprah Winfrey)*

Orang kecil, lemah, agak tulul, tapi banyak bertindak - akan lebih sukses daripada orang berbakat tapi malas. (Mario Teguh)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

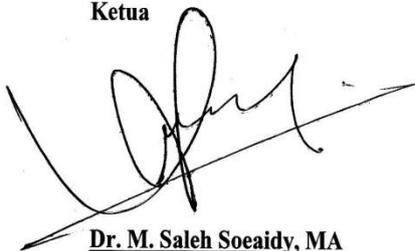
Tanggal : 11 Juli 2013

Jam : 08.00

Skripsi atas nama : Wisnu Andrianto

Judul : **Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi pada Dinas Sosial kabupaten Malang)**

dan dinyatakan lulus.

MAJELIS PENGUJI**Ketua**

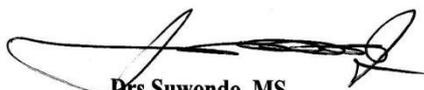
Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota

Drs. Stefanus Pani R., MAP
NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 19610905 98601 1 002

Anggota

Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 196010 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 1 Juli 2013

Wisnu Andrianto
0810313153

RINGKASAN

Wisnu Andrianto, 2013, **Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)**. Ketua Komisi Pembimbing: Dr. M. Saleh Soaeidi, MA Anggota Komisi Pembimbing: Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas daerah paling besar di provinsi Jawa Timur. Namun Kabupaten Malang juga merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Malang. Masih rendahnya akses pendidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadi banyak fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 155.745 jiwa, dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih sangat rendah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangatlah strategis dalam menunjang usaha Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang.

Rumusan masalah yang peneliti angkat antara lain: (1) Bagaimanakah tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang? (2) Bagaimanakah peran TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di kabupaten malang? (3) Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat bagi TKSK dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang? Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang. Sumber data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari tingkat angka kemiskinan yang ada di kabupaten malang, hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah oleh karenanya peran dari TKSK sangatlah perlu, adapun peran dari TKSK sudah berjalan sesuai dengan peran yang harus diembannya dari pihak dinas sosial. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan peran TKSK dalam membantu Dinas Sosial menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang ada di kabupaten Malang, yaitu kurang memadainya alat transportasi yang bisa digunakan dalam mobilisasi TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dikarenakan letak geografis yang ada di kabupaten malang masih berupa sungai sungai serta minimnya infrastruktur yang ada di desa-desa kecamatan di kabupaten malang. Begitu juga dengan kendala waktu bagi TKSK perempuan karena jam kerja TKSK tidak dibatasi oleh jam kerja, dimana setiap ada

permasalahan sosial di wilayah kerjanya TKSK harus siap mengatasinya dan hal itu sangat dirasakan ketika ada permasalahan sosial yang harus ditangani TKSK pada malam hari. Selain itu ketidakterbukaan pemilik data juga menghambat kinerja TKSK di lapangan dalam usahanya mencari data yang diperlukan.



SUMMARY

Wisnu Andrianto, 2013, **The Role of Social Welfare District Personnel in Response of Social Welfare Issues (Study at Social Department of Malang Regency)** Chairman of the Commission Advisor: Dr. M. Saleh Soaeidi, MA Member of Commission Advisor: Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP

Malang Regency is one of the greatest areas in East Java province. But Malang is also one of areas that could be classified as low level of well-being of the people. Every year, the local Government District of Malang is always trying to create programs to enhance the well-being and the quality of the human resources community in Malang. Lack of access to education is one of the main causes of many disabled social welfare problems phenomenon (PMKS) in Malang. Based on the data from Social Department population under the poverty line is amounted to 155.745 inhabitants, with a high number of poverty in Malang can be concluded that the degree of community welfare in Malang is still very low. Therefore the existence of Social Welfare Workers district is very strategic in the Social Service's efforts to support the Malang Social Service to improved social welfare in Malang.

The formulation of a problem that researchers lift, are : (1) how does the level of community welfare in Malang? (2) what is the role of TKSK in response to the problems of social welfare in Malang? (3) what are the motivating factor and barrier to solve problems in TKSK social welfare in Malang? At this research the research site is Social Departmen of Malang district. All the datas is collected through observation, interviews and documentation. The analysis of data use Miles and Huberman's model of interactive consisting of collecting data, the reduction of data, presentation of data, and the withdrawal of the conclusion.

Based on the result of the study, the level of poverty rates, indicates the degree of public welfare is still low so the role of TKSK is very important, the role of TKSK was appropriate with their role from the Social Department. There are some problems in the implementation of TKSK role to help Social Department solving the social welfare problems at Malang Regency : inadequation of transportation that could be used in mobilization of TKSK in response of social welfare issues that because geographical location of existing in the county of Malang are rivers and lack of infrastructure in the village villages and county in Malang. Also time problems for women's TKSK because working hours of TKSK is unlimited, if there were social problems in their region TKSK must be ready to solve and it really felt when there is social problems occurs at night. In addition closedness of the data owner also inhibits performance TKSK on the field in his search for the required data.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)”**. Penulis mengangkat judul di atas dengan asumsi dengan ingginya angka kemiskinan di Kabpaen Malang yang mengindikasikan tingginya penyandang masalah keejahteraan sosial di kecamatan Kabupaten Malang makan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam membantu upaya Dinas Sosial untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang sangatlah vital karena Tenaga Kesejahteraan Sosial merupakan pihak pertama yang bersentuhan langsung dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga bisa dikatakan berhasil idaknya upaya dinas sosial menanggulangi masalah kesejahteraan sosial di kabupaten malang sangat ebrgantung pada pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di wilayah kejanya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Drs. Stefanus Pani Rengu MAP, selaku Anggota Komisi Pembimbing meluangkan waktu untuk membimbing, serta memberikan masukan-masukan yang baik kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Ibu Ani Prihantari selaku kepala dinas sosial kabupaten Malang yang telah memberikan arahan, masukan, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Twiyadi selaku koordinator TKSK yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak ibu TKSK yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2013

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAN SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kontribusi Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
2.1 Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan	14
2.1.1 Administrasi Publik	14
2.1.2 Administrasi Pembangunan	15
2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.2.2 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat	23
2.3 Teori Peran.....	26
2.3.1 Pengertian Peran	26
2.3.2 Pengertian Teori Peran	28
2.4 Tenaga Kesejahteraan Sosial	33
2.4.1 Pekerjaan Sosial	32
2.4.2 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	37
2.5 Kesejahteraan Sosial	38
2.5.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial	39
2.5.2 Masalah Kesejahteraan Sosial	42
BAB III	METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Fokus Penelitian	44
3.3 Lokasi dan situs Penelitian	46
3.4 Sumber dan Jenis Data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48



3.6 Instrumen Penelitian	49
3.7 Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.2 Gambaran Umum situs Penelitian	57
4.2 Hasil Data Fokus Penelitian	78
4.2.1 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malang	78
4.2.1.1 Kondisi Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang	78
4.2.2 Peran TKSK dalam penanggulangan masalah Kesejahteraan sosial	82
4.2.2.1 Tugas dan Fungsi TKSK	82
4.2.2.3 Pelaksanaan Peran TKSK di wilayah Kerja	85
4.2.3 Faktor yang memengaruhi TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di kabupaten malang	93
4.2.3.1 Faktor penghambat TKSK dalam usaha kesejahteraan masyarakat	93
4.2.3.2 Faktor pendukung TKSK dalam usaha kesejahteraan masyarakat	97
4.3 Pembahasan Data Fokus Penelitian	104
4.3.1 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malang	104
4.3.1.1 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malang	104
4.3.2 Peran TKSK dalam penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial	107
4.3.2.2 Pelaksanaan Peran TKSK di wilayah Kerja	107
4.3.3 Faktor yang memengaruhi TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di kabupaten malang	114
4.3.4.1 Faktor penghambat TKSK dalam usaha kesejahteraan masyarakat	114
4.2.4.2 Faktor pendukung TKSK dalam usaha kesejahteraan masyarakat	117

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan	118
5.2 Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan	
	Tahun 2011	76
Tabel 2	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan	
	Tahun 2011	76
Tabel 3	Persebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Malang	80
Tabel 4	Kegiatan Pembinaan	91

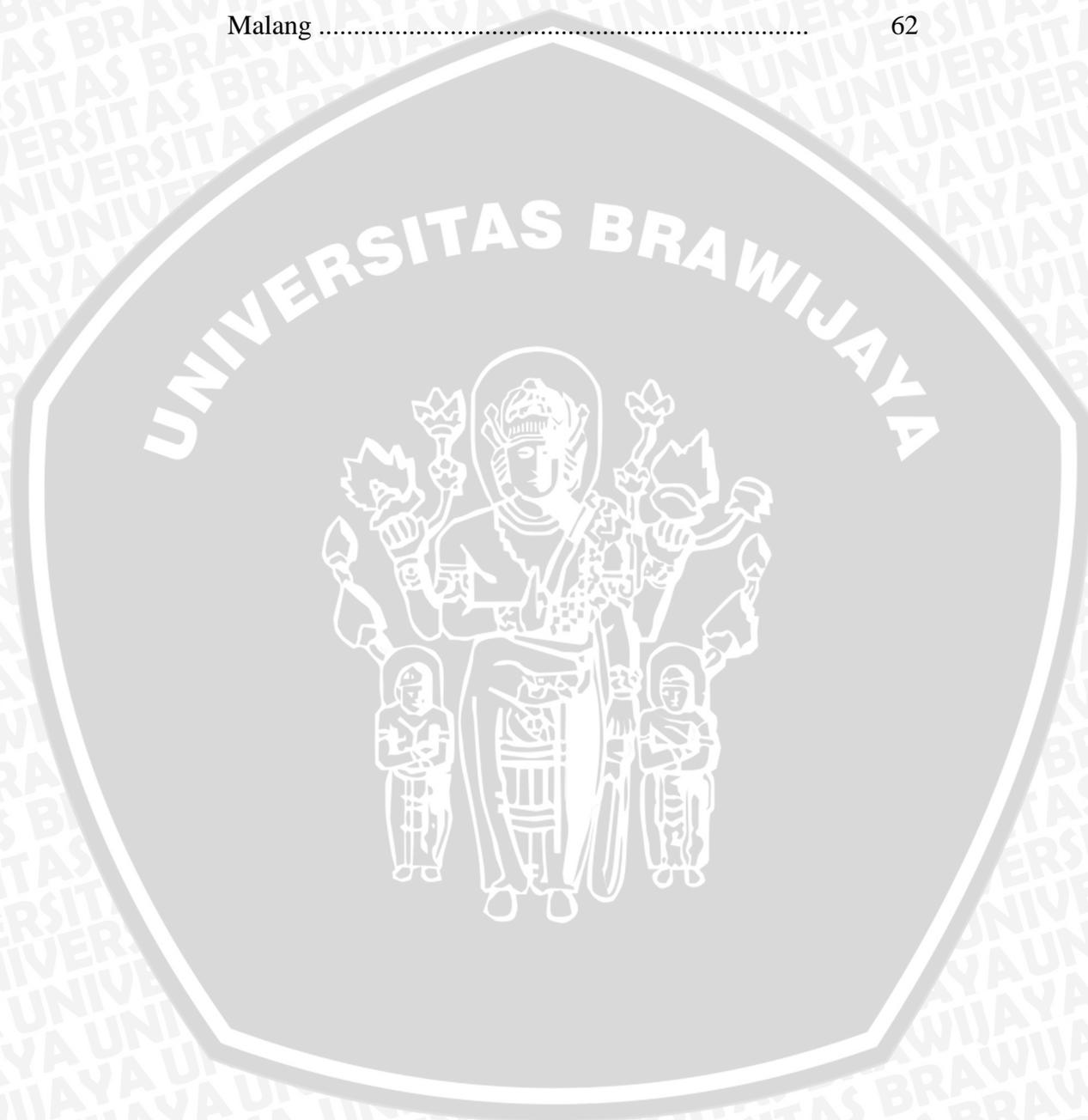


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organsasi Dinas Sosial kabupaten

Malang

62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas daerah paling besar di provinsi Jawa Timur. Namun Kabupaten Malang juga merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Kabupaten Malang berjumlah 155.745 RTM (rumah tangga miskin), Kabupaten Jember mencapai 237.700 RTM di Bondowoso sebanyak 167.366 RTM, Sampang 150.386 RTM dan Sumenep 145.788 RTM. Total jumlah warga miskin di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, ada 3.079.822 RTM atau 6.022.590 jiwa. (<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/.../brk,20100318233594,id.html>)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih rendah

Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Malang. Masih

rendahnya akses pendidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadi banyak fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

Fenomena sosial menjadi indikasi keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunannya. Di Indonesia sendiri, dengan Sumber Daya Alam yang melimpah, sebenarnya bukan hal yang mustahil menjadikan negara ini berdiri selangkah lebih maju setidaknya dari negara tetangganya. Nyatanya di Indonesia krisis ekonomi masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Juga karena pemerintah yang diharapkan muncul sebagai pahlawan untuk memberikan solusi guna keluar dari keterpurukan, ternyata pada saat ini telah dianggap gagal untuk mengatasi permasalahan yang cukup menyengsarakan perekonomian rakyat, khususnya rakyat kelas bawah.

Kabupaten Malang sendiri menjadi salah satu Kabupaten yang mengadopsi fenomena sosial ini. Semakin lama jumlah PMKS di Kabupaten Malang mengalami peningkatan drastis.

([http://www.malangkab.go.id/imgnews/RPJMD\(2\).](http://www.malangkab.go.id/imgnews/RPJMD(2).))

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana setiap warga negara hidup

layak dan bebas dari kemiskinan Usaha-usaha kesejahteraan sosial itu mewujudkan dan memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan nasional. Dari uraian diatas kebijakan publik mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan rakyatnya. Kebijakan Publik juga memegang peranan penting dalam proses sebuah negara untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Karena hanya dengan sebuah kebijakan yang tepat dan efektiflah tujuan sebuah negara dapat diwujudkan. Salah satu kebijakan yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan publik adalah Kebijakan Sosial, kebijakan sosial merupakan salah satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Dimana dalam kebijakan sosial terkandung nilai nilai pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial dimana dalam pemberdayaan diperlukan seorang pendamping yang disini penulis sebut dengan Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat UU KS, telah lahir melalui pengesahan dalam sidang paripurna DPR RI 18 Desember 2008. Implikasi UU KS ini amat luas. Pemerintah, DPR RI, DPD RI, instansi pemerintah terutama *stake holder* yang sudah menjadi mitra kerja Kementerian Sosial, dunia usaha, masyarakat terutama lembaga terkait dengan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial harus aktif mendukung dan bekerja sama lebih baik, lebih terbuka, agar implementasi dari UU KS ini di lapangan tidak terlalu terkendala, akan berjalan dengan baik, dalam arti pelayanan sosial bagi masyarakat terselenggara dengan sebaik mungkin. Karena jika kita melihat kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan refleksi dari suatu kondisi yang diidealkan atau diimajinasikan oleh pemikir dan pemegang kebijakan sosial. Implikasi UU KS terutama menyangkut penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pekerja sosial profesional, amat berdampak luas.

Selain itu mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut telah memberi isyarat terbukanya peluang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk tampil ke depan menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan atau yang sering disebut Usaha Kesejahteraan Sosial.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha

kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh kursus bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai Sosiawan/Sosiawati, Batu Dasar Sosial, Kader-kader Sosial, Pembimbing Sosial, Penggerak Sosial, Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Pembimbing Sosial Lapangan (PSL), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSk), Pembina Keserasian Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Pekerja Sosial sendiri merupakan profesi utama dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksud meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu melibatkan Pekerja Sosial baik dalam tataran mikro, mezo maupun makro. Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayanannya.

Dampak dari proses-proses pertolongan yang diarahkan pada keberfungsian sosial dan kemandirian sasaran pelayanan tersebut

setidaknya: pertama, berkurangnya beban keluarga, masyarakat dan atau negara dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial; kedua, munculnya perilaku positif dan produktif dari kelompok sasaran pelayanan yang tidak saja memberi manfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga akan memberi sumbangsih bagi kemajuan lingkungan sosialnya bahkan negara dalam cakupan yang lebih luas dalam arti dengan berkurangnya penyandang masalah sosial tentu tingkat kesejahteraan masyarakat itu meningkat.

Mengenalinya tentang siapa pekerja sosial akan memunculkan beberapa figur meliputi mereka yang tergolong profesional dan non profesional. Kepmensos No. 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Pada sisi lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membedakan 4 jenis sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial.

Jika mengacu pada dua peraturan tersebut maka Pekerja Sosial dimaksud adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari



pendidikan formal atau pengalaman praktik dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan lebih berfokus pada kerja sosial fungsional/PNS. Pertanyaannya bagaimana dengan Pekerja Sosial non profesional atau relawan sosial TKSK termasuk didalamnya juga para pendamping lapangan? Padahal peran mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial sangat besar. Terlebih melihat kenyataan bahwa Pekerja Sosial Profesional masih sangat terbatas sehingga keberadaan para Tenaga Kesejahteraan Sosial sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mensukseskan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial. Pertanyaannya siapa yang dapat dikatakan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial?

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah mereka yang berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial yang memiliki pengalaman pelayanan sosial minimal 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu

pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan / pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar keasadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya di bidang kesejahteraan sosial.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah diakui sebagai gerak dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Kedua jenis data ini menjadi dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pelayanan sosial. Akan tetapi, untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka diperlukan metodologi dan instrumen yang benar-benar mampu mengukur jenis PMKS dan PSKS berdasarkan konsep dan indikatornya. Masalah kesejahteraan sosial akan selalu terjadi di manapun dan kapanpun, sehingga diperlukan penanganan yang holistic dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Untuk menjembatani hambatan

seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator/ manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan/ menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang sampai saat ini jumlah TKSK di Kabupaten Malang yang telah mengikuti pelatihan tingkat Propinsi berjumlah 33 orang dimana masing TKSK berlokasi di 1 kecamatan. Dengan jumlah yg terbatas tersebut TKSK dituntut untuk menghasilkan kualitas pelayanan sosial yang semakin dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas di bidang kesejahteraan sosial. Sejalan dengan perkembangan masalah-masalah kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial bukan hanya di perkotaan tetapi juga didaerah pedesaan. Kenyataan bahwa masalah-masalah kesejahteraan sosial di Indonesia semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional, salah satu tenaga profesional ini salah satunya adalah TKSK. Dari uraian diatas penulis mengambil judul. **Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Malang”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Malang ?
- 2) Bagaimana peran TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang ?
- 3) Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat bagi TKSK dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Malang
- 2) Untuk mengetahui peran TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi TKSK dalam penanggulanagan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

1.4 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat atau kontribusi yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial

b. Manfaat praktis

1. Agar dinas sosial Kabupaten Malang lebih baik dan efektif dalam menyusun program PMKS di kabupaten Malang.
2. Masyarakat Kabupaten Malang mengerti tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai agen dari Pemerintah Kabupaten Malang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis membagi tulisan menjadi lima bagian yang terdiri dari :

1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini telah memuat beberapa sub-bab yang diantaranya ; latar belakang tentang mengapa dibuatnya penelitian tentang peran TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Selain itu juga terdapat rumusan masalah, tentang bagaimana tingkat kesejahteraan sosial di kabupaten malang, peran dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang serta faktor-faktor

penghambat dan pendukung bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di kabupaten Malang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan pada Bab I. Teori-teori yang disajikan dalam bab ini antara lain, teori peran, teori kesejahteraan sosial, teori pekerjaan sosial dan teori pemberdayaan. Kemudian teori-teori tersebut dianalisis untuk mendukung temuan peneliti di lapangan dalam Bab IV.

3. METODE PENELITIAN

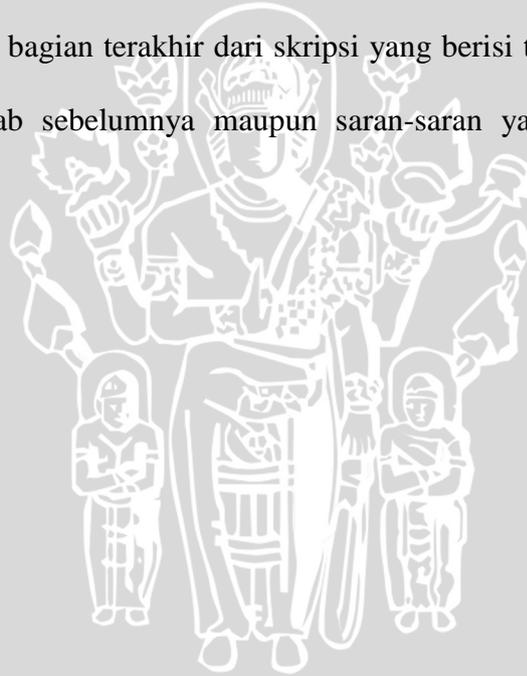
Pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, fokus, pemilihan lokasi yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian yang kemudian diakhiri dengan metode analisis. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan deskripsikan secara nyata temuan yang peneliti lihat di lapangan.

4. HASIL PENELITIAN

Di jelaskan tentang gambaran umum instansi yang menjadi objek penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyajian data meliputi tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Lalu kemudian diakhiri dengan analisis dan pembahasan berbagai masalah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya maupun saran-saran yang diberikan oleh penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

2.1.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2004), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplemetasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam administrasi publik.

Fokus utama teori administrasi menurut Fayol dalam (Pasolog, 2007) adalah penentuan tipe spesialisasi dan hirarki yang paling mengoptimalkan efisiensi organisasi. Teori administrasi dibangun atas empat pilar utama yaitu : pembagian tenaga kerja, proses skala dan fungsional, struktur organisasional dan rentang kendali (*Span of Control*).

Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pemimpin dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik



2.1.2 Administrasi Pembangunan

Menurut Fred W. Riggs (1971) mengatakan bahwa Sederhananya peristilahan administrasi *pembangunan* menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melakukan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Ungkapan peristilahan tersebut analog dengan istilah-istilah seperti administrasi pertanian, administrasi pendidikan dan organisasi kesejahteraan sosial, yang masing-masing meliputi suatu usaha terorganisasikan untuk melaksanakan program pertanian, pendidikan, dan program-program kesejahteraan sosial.

Sekalipun demikian kata “pembangunan” mempunyai maksud atau makna yang lebih luas dibanding peristilahan programatik seperti pertanian, dan pendidikan. Tentu di sana terdapat sejumlah literatur yang luas mengenai hal tersebut. Pembahasan kali ini tidak dimaksudkan untuk memperbincangkan masalah itu kembali. Yang jelas bahwa kebanyakan literatur tersedia lebih berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi; peningkatan produksi dari satu kapital, dan penyediaan barang bagi konsumen.

Dalam arti ini, maka administrasi pembangunan tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program terencana dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program.



Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata *pembangunan* sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Seperti dikatakan oleh Seers (1969) di sini ada pertimbangan nilai (*value judgment*). Atau menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan (*favourable value orientation*). Namun, ada perbedaan antara arti pembangunan dan perkembangan. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan tidak perlu ada upaya tertentu.

Adanya upaya yang diselenggarakan secara berencana, merupakan unsur penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat adanya pandangan bahwa perubahan sosial adalah hukum sejarah yang akan terjadi dengan sendirinya walaupun tanpa upaya. Dalam kata pembangunan, hal yang pokok yaitu adanya hakikat *membangun*, yang berlawanan dengan *merusak*. Oleh karena itu, perubahan ke arah keadaan yang lebih baik seperti yang diinginkan dan dengan upaya yang terencana, harus dilakukan melalui jalan yang tidak merusak, tetapi justru mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Menurut Bintoro Tjokroamijojo (1986) dalam bukunya Pengantar Administrasi Pembangunan mengemukakan bahwa “Proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara atau pemerintah untuk merealisasikan

pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.”

Menurut Montgomery dan Esman dalam Pasolog (2007), administrasi pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada pemerintahan (*the development of administration*) dan juga berarti perbaikan dari pelaksanaan usaha pembangunan (*administration of the development*).

Sedangkan menurut Siagian (2001) Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dari beberapa definisi tersebut, adanya persamaan ide pokok yaitu:

1. Adanya suatu proses. Proses disini berarti suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus.
2. Adanya administrator, dalam hal ini adalah pemerintah atau Negara.
3. Adanya masyarakat.
4. Perubahan dan modernisasi. Yang maksudnya adalah keinginan perubahan ke arah yang lebih baik yang multi dimensi, dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan juga administrasi.

Bintoro Tjokroamidjojo dengan mengutip pandangan Montgomery dan Esman dalam *Development Administration Malaysia* (1965),



mengemukakan ciri-ciri dan ruang lingkup administrasi pembangunan sebagai berikut:

1. Ciri-ciri pokok

Pertama, orientasi administrasi pembangunan adalah kepada usaha-usaha kearah perubahan yang dianggap lebih baik yang dimaksudkan untuk membantu dan mendorong kearah perubahan-perubahan besar/mendasar berbagai bidang kehidupan, termasuk penyempurnaan administrasi guna mendukung usaha-usaha pembangunan. Kedua, pendekatan administrasi pembangunan adalah pada perbaikan dan penyempurnaan administrasi yang dikaitkan dengan aspek perkembangan dibidang-bidang sosial, politik, dan lainnya.

2. Ruang Lingkup

Pertama, penyempurnaan administrasi publik (*the development of administration*) yang mencakup kepemimpinan, koordinasi, pengesahan, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana administrasi, kelembagaan dan lain sebagainya. Selain itu juga perumusan kebijakan/program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Kedua, penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi penyempurnaan proses perumusan kebijakan pembangunan dan tata pelaksanaannya secara efektif (*the administration of development*).

Baik ciri-ciri maupun ruang lingkup administrasi pembangunan menggambarkan saling kaitannya dan sekaligus menunjukkan peran dan fungsi utama administrasi publik dalam pembangunan. Bahkan Siagian (1986) dalam bukunya menyatakan bahwa sebagian kegiatan-kegiatan pembangunan menyangkut masalah-masalah administrasi. Karenanya dapat dikatakan bahwa sukses atau tidaknya proses pembangunan itu berlangsung sangat tergantung atas kemampuan administrasinya. Penyempurnaan infrastruktur administrasi yang tangguh (membangun

administrasi) merupakan langkah awal bagi perbaikan penyempurnaan manajemen pembangunan.

Penyempurnaan administrasi publik bisa mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia administrasi (birokrasi publik), organisasi birokrasi, sistem dan prosedur kerja, sarana/prasarana kerja, budidaya birokrasi, akuntabilitas, pembinaan kelembagaan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi sasaran birokrasi sehingga tugas-tugas pembangunan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).

Administrasi pembangunan pada hakekatnya adalah administrasi Negara yang mendukung usaha-usaha dalam memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Oleh karenanya, menurut George F. Gant (1979) dalam Hardjanto (2008), administrasi pembangunan itu merupakan penyempurnaan birokrasi (aparatur pemerintah) untuk menghadapi meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintahan guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan adalah administrasi mengenai kebijaksanaan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan dimana salah satu tujuan pembangunan adalah mengatasi permasalahan sosial yang ada dengan melakukan pemberdayaan.



2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat sebenarnya mengacu pada kata *Empowerment*, yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004:77)

Sedangkan menurut UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial “Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”.

Oleh karena itu, pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang

bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebhinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita dalam yang dalam kondisi sekarang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, hingga muncul perubahan yang lebih efektif dan efisien.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (Kartasmita 1997:1).

Model pemberdayaan masyarakat *people centre development* mencoba mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai

mahluk yang memiliki harga diri, kemampuan intelegensi dan perasaan. Menurut model ini, pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya (Surjono dan Nugroho, 2008:29)

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Payne (1997) dalam Adi (2008:78) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna

“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of sosial or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”

(membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*).

2.2.2 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan proses pemberdayaan diperlukan sebuah tahapan maupun mekanisme yang jelas guna mendukung terlaksananya proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut (Kartasasmita, 1997:15-17) :

Pertama, peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan :

1. Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
2. Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
3. Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya

pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.

4. Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
5. Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
6. Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus (1) ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, (2) ditingkatkan kualitasnya, agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hirarkis seperti aparat desa dan kecamatan, maupun fungsional seperti PPL, guru, dokter, dan bidan.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), disamping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri. Dalam rangka ini, aparat setempat harus menjalin kerjasama erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengakibatkan benturan yang hanya akan merugikan rakyat. LSM harus diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari kepentingan politik yang hanya menggunakan rakyat sebagai alat politik.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasi-formal seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok pakatan dan sebagainya.

Keempat, pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya..

Kelima, keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha penduduk miskin.

“Pemberdayaan tidaklah bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi” (Sumodiningrat, 2000 dalam Sulistiyani, 2004:82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus agar tidak mengalami kemunduran lagi. Di dalam melakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus diperlukan peran dari pemerintah dan masyarakat.

2.3 Teori Peran

2.3.1 Pengertian Peran

Konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dikemukakan oleh Paul B. Horton dan Chesner L. Hunt yaitu peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai status (Horton dan Hunt,1987:116). Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut, dalam arti tertentu status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan.

Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan definisi peranan sebagai berikut:

“Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya” (Soekanto,2005:243).

Peranan menurut gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.

2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya. (Berry, 1995:101)

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”(Soekanto,2005:243).

Menurut Soekanto pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogianya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat betapa

masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.(Soekamto,2005:246)

Didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dianggap proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak hanya mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

2.3.2 Pengertian Teori Peran

Setiap orang yang bertindak sebagai pelaku peran memiliki kesadaran akan posisinya dalam masyarakat. Hal menduduki posisi atau kedudukan membawa konsekuensi berupa tekanan-tekanan yang datang dari sistem sosial dan belum tentu dapat dipenuhi, maka akan muncul dua kemungkinan. Pertama, pelakuan memenuhinya secara lugas; kedua, memenuhinya secara arstfisial (suhardono, 1994:62)Paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran ini adalah paham strukturalis dan interaksionis. Paham yang pertama lebih mengkaitkan antara peran-peran sebagai unit kutlural serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normative telah dicanangkan oleh sistem budaya. Paham kedua paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran; terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran (role enactment), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu

pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya, ia berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. (Suhardono, 1994:3).

Horton & Hunt dan David Berry memiliki penjelasan yang hampir sama mengenai konsep peran. Mereka menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status (Horton & Hunt, 1991: 118-119)

“Konsep peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula”. Berry mengatakan “bila individu-individu menempati kedudukan-kedudukan tertentu maka mereka merasa bahwa setiap kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan (expectations) tertentu dari orang-orang disekitarnya”. (Berry, 1982:99)

Menurut Broom dan Selznick, peran dapat ditinjau dari tiga perspektif, yaitu perspektif prescribed role, perspektif perceived role, perspektif actual role. (Raho, 2003:104-105)

1. Perspektif Prescribed Role

Perspektif Prescribed role atau peran yang didasarkan pada harapan-harapan masyarakat atau peranan yang ideal. Setiap masyarakat

pada umumnya selalu mempunyai harapan tertentu dari individu yang menempati status atau posisi sosial tertentu, seperti suami, istri, orang tua dan anak. Harapan itu tentu berbeda dari satu masyarakat kemasyarakatan lainnya.

2. **Perspektif Perceived Role**

Perspektif Perceived role atau peran yang didasarkan pada pertimbangan pribadi. Peranan ini mungkin saja tidak sejalan dengan harapan dari masyarakat tetapi harus dilakukannya karena menurut pertimbangan hal itu adalah baik.

3. **Perspektif actual role**

Perspektif actual role atau peran yang didasarkan pada bagaimana peranan itu diwujudkan atau diaktualisasikan. Pelaksanaan suatu peranan seringkali tidak cuma didasarkan atas harapan-harapan masyarakat (prescribed role) atau pertimbangan-pertimbangan pribadi (perceived role) tetapi juga berdasarkan tekanan-tekanan yang dialami atau peluang-peluang yang ada atau situasi-situasi khusus. Ada dua macam status dan peran yang dikenal dalam masyarakat, yaitu: Status dan peran yang ditentukan oleh masyarakat bagi kita, terlepas dari kualitas individu maupun usaha-usaha kita dan status serta peran yang kita perjuangkan melalui usaha-usaha kita sendiri. (Horton & Hunt, 1991: 122).

Mempelajari peran sekurang-kurangnya melibatkan dua aspek:

1. Kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran;

2. Kita harus memiliki sikap,perasan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut. (Horton&Hunt, 1991:118)Pada kenyataannya dalam masyarakat tidak semua orang bias menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat, oleh karena itulah sangat perlu bagi masing-masing individu untuk memiliki aspek yang kedua dalam mempelajari perannya tersebut.

1. Desakan Atau Beban Peran

Dalam hidupnya, seringkali setiap individu mendapatkanejumlah peran dalam waktu yang bersamaan, sehingga mustahil bagi seorang individu untuk menjalankan seluruhperannya sekaligus dengan sangat baik. Desakan peran (rolestrain) mengacu pada kesulitan orang dalam menghadapi peran mereka. Desakan peran ini dapat muncul karena persiapan peran yang tidak memadai, kesulitan peralihanperan, konflik peran atau kegagalan peran.

2. Konflik peran

Menurut Berry, individu dalam masyarakat yang memainkan bermacam peranan sosial, dikenai oleh seperangkat harapan pada masing-masing peranan tersebut bila mengambil semua peranan sekaligus, kemungkinan besar harapan-harapan tersebut tidak serasi satu sama lain.

Bahkan beberapa harapan saling bertentangan satu sama lain. (Berry,1982: 126)

“Konflik peranan menggambarkan suatu keadaan dimana individu dihadapkan oleh harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peran yang dimilikinya dan merupakan suatu keadaan yang kebanyakan orang dengan berbagai cara berusaha menanggulangnya”.Bila peranan dilihat suatu proses yang terus menerus mengalami penyesuaian dalam interaksi sosial, maka penampilan dari peranan lebih merupakan suatu proses adaptasi diri seseorang pada peranan dan sebaliknya,daripada sekedar kepatuhan atau penyimpangan terhadap peran-peran tersebut” (Berry, 1982:130)

2.4 Tenaga Kesejahteraan Sosial

2.4.1 Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi kemanusiaan yang telah lahir cukup lama. Sejak kelahirannya tahun 1800-an (Zastrow, 1999;Zastrow, 2000;Sulman'2000), pekerjaan sosial terus mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan dan aspirasi dari masyarakat. Namun demikian seperti halnya profesi alin fondasi dan prinsip dasar pekerjaan sosial tidak mengalami perubahan. Tan dan eval (2000:4) berujar, "*while sosial work explores change and adapts to various demand... the basic ingredients of sosial work must remain in the changing tide.*"

Pekerjaan sosial adalah aktifitas professional untuk menolong individu,kelompok dan masyarakat dalam meningkatkanatau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut(Zastrow,1999). Sebagai suatu aktifitas professional pekerjaan sosial didasari oleh 3

komponen dasar yang secara integrative membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial yaitu kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of value*). Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan secara eklektik dari beberapa ilmu sosial. Nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial dapat dilihat dari definisi pekerjaan sosial terbaru. Dalam konferensi dunia di Montreal Kanada Juli tahun 2000, Internasional Federation of Social Workers (IFWS) (Tan dan Envall, 2000:5) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut :

The sosial work profession promotes problem solving in human relationship, sosial change, empowerment and liberation of people, and the encancement of society. Utilizing theories of human behavior and sosial systems, sosial work intervenes at the point where people interact with their environment. Principles of human rights and sosial justice are fundamental to sosial work.

(Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan system sosial. Pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial).

Secara garis besar ilmu dan metode penyembuhan sosial pekerjaan sosial terdiri atas pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro merujuk pada berbagai keahlian pekerjaan sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu, keluarga dan kelompok. Dua metode utama yang biasa diterapkan oleh pekerja sosial dalam setting mikro ini adalah terapi perseorangan dan terapi kelompok yang didalamnya melibatkan berbagai

teknik penyembuhan seperti terapi berpusat pada klien, terapi keluarga, terapi perilaku, terapi kelompok.. Pendekatan makro adalah penerapan metoda dan teknik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi sosial. Tiga metoda utama dalam pendekatan makro adalah terapi masyarakat, manajemen pelayanan kemanusiaan, dan analisis kebijakan sosial. Perbedaan mendasar antara terapi masyarakat, manajemen pelayanan kemanusiaan dan kebijakan sosial adalah jika dua metoda yang disebut pertama merupakan pendekatan pekerjaan dalam praktek langsung dengan kliennya, maka analisis kebijakan sosial merupakan metode pekerjaan sosial dalam praktek tidak langsung dengan kliennya.

Dalam Proses pertolongannya peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara umum peran pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan.

3. Meningkatkan kinerja lembaga lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif,berkualitas dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan fungsi sosial melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerja sosial. Ia merupakan pembeda anatar profesi pekerjaan sosial dan profesi lainnya. *“Sosial functioning to be a central purpose of social work dan intervension was seen as the enhancement of sosial functioning”*,begitu kata Skidmore,Thrackeray dab Farley(1991:19). Suharto dkk mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai kemampuan orang(individu,keluarga,kelompok atau masyarakat) dan system sosial(lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar,menjalankan peranan sosial,serta menghadapi goncangan dan tekanan.

2.4.2 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Keamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tingkat Kecamatan, sebagai tenaga relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atas dasar kesukarelawan dan keiklasan



untuk mengabdikan. Eksistensi TKSK sangat diperlukan di wilayah Kecamatan untuk mengisi infrastruktur sosial di wilayah ini sejak Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) tidak didayagunakan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan/ dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan.
2. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan sosial
3. Mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial dengan instansi terkait dan pihak terkait (stake holder) di tingkat Kecamatan

4. Berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial. Termasuk di dalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.

Mitra kerja dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

diantaranya :

1. Berbagai perkumpulan / asosiasi / organisasi / yayasan / NGO
2. Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha
3. Tokoh Masyarakat
4. Warga Masyarakat
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
7. Pemangku kepentingan lainnya.

<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=47>

4)

2.5 Kesejahteraan Sosial

2.5.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. PBB misalnya telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional (Suharto 1997). PBB memberri batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan yang

terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas individu, kelompok dan masyarakat.

Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam system ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang RI nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang system perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian Negara terhadap kaum lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta system jaminan sosial. Ini berarti kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* system perekonomian dan system

sosial di Indonesia(Suharto, 2002;Swasono, 2004). Sehingga sejatinya Indonesia adalah Negara yang menganut faham “ Negara Kesejahteraan” dengan model Negara Kesejahteraan Partisipatif” yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Plularisme kesejahteraan. Model ini menekankan bahwa Negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial meskipun oprasionalnya tetap melibatkan masyarakat.

Dengan demikian kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang berbeda meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup 3 konsepsi,yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera,yakni terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial
2. Insitusi,arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktifitas, yakni suati kehiatan atau usaha-usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera(konsepsi pertama) yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan ,pendidikan dan perawatan kesehatan.Pengertian seperti ini menempatkan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu pembangunan. Misalnya tujuan

pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial juga bias didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi kesehatan adalah tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah guru melaksanakan tugas tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (means) untuk mencapai tujuan pembangunan(Suharto, 2004).

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk sebagai aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktifitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Negara yang umumnya berbentuk jaminan sosial atau asuransi sosial semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin,tunjangan pengangguran,tunjangan keluarga. Beberapa skema yang dapat dikatan sebagai perlindungan sosial yang bersifat informal antara lain usaha ekonomi produktif,kredit mikro,arisan,dan berbagai skema jarring pengaman sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat,organisasi sosial local,atau lembaga swadaya masyarakat.



2.5.2 Masalah Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya masalah kesejahteraan sosial tidak berbeda dengan masalah sosial. Namun dalam penekanannya, masalah-masalah kesejahteraan sosial lebih berhubungan dengan segenap permasalahan sosial sebagai kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial, baik yang dialami individu, kelompok maupun masyarakat. Permasalahan yang disebabkan ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial karena adanya rintangan maupun hambatan-hambatan dalam mewujudkan nilai-nilai, aspirasi, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Horton dan Leslie menyatakan bahwa

“ Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif ” (Suharto, 2008:71).

Secara umum ada 2 faktor penyebab timbulnya masalah-masalah kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Faktor dari dalam individu (intern), misalnya karena cacat fisik sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosial.
2. Faktor dari luar individu (ekstern), misalnya dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Pada hakekatnya permasalahan kesejahteraan sosial dari dapat atau tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Permasalahan kesejahteraan sosial yang secara nyata berpangkal pada hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan,ada yang timbul dan berkembang sebagai pengaruh dari perubahan sosial-ekonomik serta penggunaan ilmu dan

teknologi dalam kehidupan manusia. Disamping itu juga permasalahan yang sering tidak adapat auat sukar diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2011:6).

Jane Richie dalam Moleong (2011:6) mendefinisikan “penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti”.

Dengan demikian penelitian ini berupaya mendiskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan, kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut yang disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis

terkait upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai pokok permasalahan awal yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya. “Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus” (Moleong, 2011:93). Dengan terlebih dahulu menentukan fokus penelitian, penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan mendalam. “Fokus dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian” (Moleong, 2011:95)

Fokus penelitian adalah hal-hal yang akan dijadikan sebagai pusat penelitian dalam penelitian ini, dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini antara lain :

1. Kondisi kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malang
 - Tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Malang.
 - Jumlah PMKS di daerah Kabupaten Malang.
 - Persebaran PMKS di Kabupaten Malang.
2. Peran TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
 - Tugas dan fungsi TKSK

- Pelaksanaan Tugas TKSK di wilayah kerja
3. Faktor yang mempengaruhi TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang
- Faktor pendukung dan penghambat TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang.
 - Cara TKSK menanggulangi faktor penghambat dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang. Dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Malang masih banyak ditemukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta kemampuan TKSK di wilayah Kabupaten dalam menghadapi permasalahan sosial yang ada di wilayah kerjanya yang luas.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat dan valid. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan asal dari manakah data tersebut diperoleh atau didapatkan. Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2011:157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Suatu penelitian membutuhkan data yang digunakan untuk deskripsi maupun untuk menjawab perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali
2. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya oleh Biro Statistik, majalah, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya.

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis data primer

Data diperoleh peneliti melalui penelitian secara langsung untuk mengambil data, yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung

- Wawancara kepada Kepala Dinas, perangkat dan staf di Dinas Sosial Kabupaten Malang

- Wawancara dan observasi kepada para TKSK dan warga kecamatan di Kabupaten Malang

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti. Yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu pihak atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Adapaun data pendukung ini berasal dari dokumen-dokumen seperti jenis-jenis upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di daerahnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Interview

Pengumpulan data dengan melalui teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dan tanya jawab langsung dengan sumber data dan informan yang dapat mendukung data penelitian yang dibutuhkan. Tujuan dari wawancara tersebut harus dapat dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti kepada sumber data atau informan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Sedangkan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Observasi

Dalam teknik ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan alat-alat indera untuk dapat memperoleh data-data yang dapat mendukung penelitian secara nyata. Pengamatan yang dilakukan mengenai proses implementasi peran TKSK di kabupaten Malang dalam usaha kesejahteraan masyarakat.

3. Dokumentasi

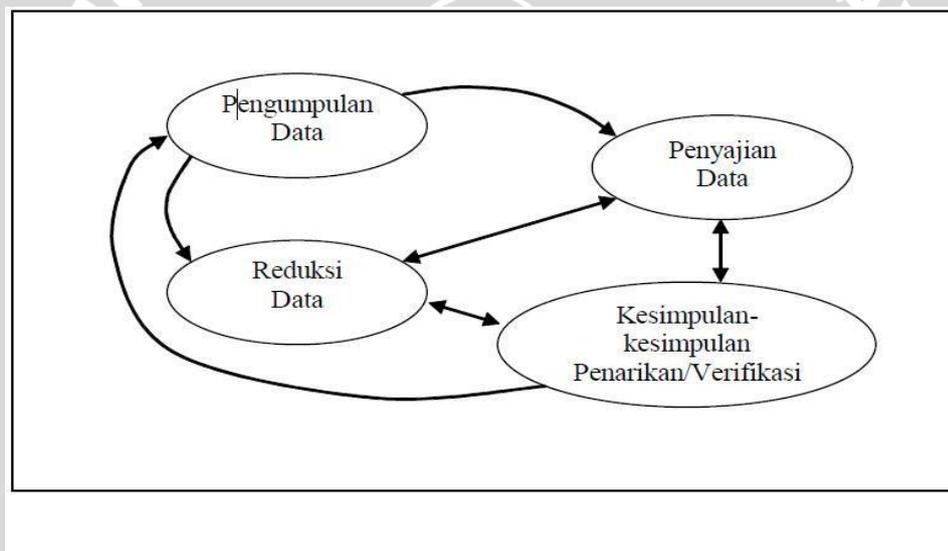
Teknik Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, majalah, atau dapat juga berupa gambar atau catatan-catatan khusus yang relevan dengan penelitian serta data-data yang berlaku sekarang sebagai pendukung kebenaran sumber data.

3.6 Instrumen Penelitian

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Jadi dalam hal ini peneliti sendiri adalah merupakan instrumen penelitian, yaitu dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, digunakan juga wawancara dengan pihak terkait sehingga peneliti mendapat berbagai macam informasi mengenai strategi Pemerintah dalam pembinaan gelandangan dan pengemis. Selain itu juga digunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut maka dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian serta dasar dalam mendeskripsikan peristiwa, situasi, maupun konsepsi sebagai suatu data pada objek yang sedang diteliti, Menurut Miles dan Huberman (1992:16), gambar komponen analisa data di bawah:



Komponen-Komponen Analisis Data (Miles dan Huberman, 2007:20)

Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2008:85-88) menyebutkan bahwa analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-

gugus, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

Di Dinas Sosial Kabupaten Malang terdapat beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan TKSK, namun penulis hanya memilih beberapa dokumen yang dianggap penting dan berkaitan dengan penelitian antara lain buku pedoman dinas sosial kabupaten Malang, buku pedoman kegiatan TKSK.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

Setelah memilih dokumen serta data-data yang ada, penulis melakukan penyajian data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyajian data ini berguna untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan TKSK di wilayah kerjanya. Selain itu penyajian data juga untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya pada saat penelitian. Dalam penyajian data biasanya diberi keterangan seperti gambar dan tabel. Dalam penelitian ini penulis membuat tabel tentang persebaran rumah tangga miskin di kabupaten

malang dan tabel kegiatan pembinaan yang diikuti dan dilakukan oleh TKSK. Data selanjutnya untuk memperkuat penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti saat di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key informan*.

Setelah dilakukan penyajian data, langkah akhir dari rangkaian analisa data ini adalah membuat kesimpulan dari berbagai data yang didapatkan peneliti saat di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam hal ini adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur.

1. Pembagian Administratif

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desadan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan

menjadi kota. Ibu kota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen.

2. Sejarah

Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri, dan saat jatuh ke tangan Singhasari statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 - 1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan yang ada di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut *Folklore*, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah.

Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desaseperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka.

Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkrit seperti :

- a. Candi Kidal di Desa Kidal kecamatan Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati.
- b. Candi Singhasari di kecamatan Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara.
- c. Candi Jago / Jajaghu di kecamatan Tumpang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana.

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 - 1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati.

Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan.

3. Kondisi Geografis

Kabupaten Malang terletak pada 112°03'50" sampai 112°57'00" Bujur Timur 7044'55011" sampai 8026'35045" Lintang Selatan. Kabupaten disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dan selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

Dengan kondisi di atas, maka Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil

sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi, dan cokelat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.

4.1.2 Gambaran Umum Situs Penelitian

Situs penelitian dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang di Jl. Mojopahit No. 05 TELP/ FAX. (0341) 362601 Malang. Dinas Sosial Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial. Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sebagai suatu organisasi pemerintahan, Dinas Sosial Kabupaten Malang memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar tujuannya tercapai. Visi merupakan suatu pandangan organisasi yang jauh ke depan yaitu kemana organisasi tersebut akan dibawa dan dikembangkan agar dapat mempertahankan eksistensinya. Sebuah visi dapat menjadi motivasi suatu organisasi untuk selalu inovatif dan kreatif.

Misi merupakan rumusan yang bersifat luas dan bersifat jangka panjang mengenai maksud dan sifat dari sebuah organisasi. Misi mengandung filosofi publik, mensyaratkan kualitas yang ingin diberikan serta mencerminkan konsep diri pemerintah. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Malang yang terdapat dalam Rencana Strategi (Restra) organisasi/ instansi adalah sebagai berikut:

1.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Malang

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui usaha bersama pemerintah dan masyarakat

1.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Malang

- a) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup masyarakat untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan kualitas kelembagaan organisasi sosial.
- b) Menggalang potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta meningkatkan partisipasi sosial masyarakat.
- c) Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial.
- d) Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan.

2. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Malang

- a) Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat

- b) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
- c) Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d) Terentasnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- e) Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial serta kesetiakawanan sosial masyarakat.
- f) Terwujudnya peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
- g) Terlestarikan, tertanam dan teramalkannya nilai-nilai kepahlwanan, keperintisan dan kejuangan.

3. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Malang

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan
- b) Meningkatkan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial
- c) Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial
- d) Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial
- e) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial



4. Tata Nilai Dinas Sosial Kabupaten Malang

Nilai luhur yang berkembang di masyarakat dan memberikan semangat dalam mengembangkan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang, antara lain :

- a) Rasa Kebersamaan dan Kegotong - royongan
- b) Toleransi
- c) Semangat Kesetiakawanan Sosial.

5. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Malang

5.1 Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Malang

- a) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang sosial
- b) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah

5.2 Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Malang

- a) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya

5.3 Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Malang

- a) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
- b) Perencanaan strategis pada Dinas Sosial
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial

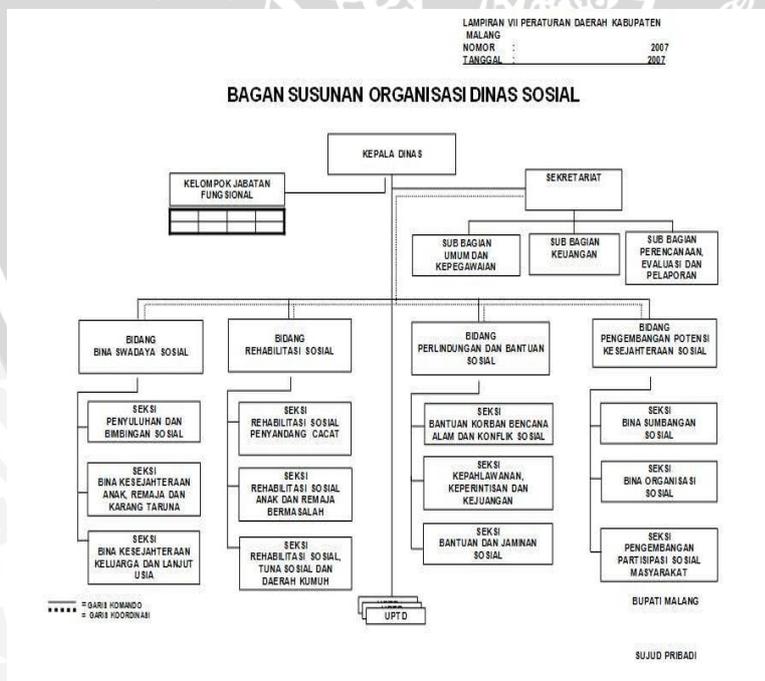
- e) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang sosial
- f) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang sosial
- g) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial
- h) Pembinaan UPTD
- i) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial
- j) Pengkoordinasian dalam rangka meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat, usaha sosial lainnya dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat
- k) Pembinaan dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam rangka pelayanan terhadap usaha sosial meliputi Panti Asuhan, Panti Rehabilitasi Sosial dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat
- l) Pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
- m) Penyiapan rekomendasi proses pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial serta keagamaan
- n) Pembuatan rekomendasi dan proses perizinan pendirian panti sosial dan adopsi anak
- o) Penyelenggaraan usaha preventif, kuratif dan rehabilitasi serta promotif dalam penanganan kesejahteraan sosial

- p) Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerjaan sosial profesional panti sosial swasta
- q) Pemberian rekomendasi ijin undian sosial berhadiah skala Daerah
- r) Pengendalian dan pelaksanaan undian tingkat daerah
- s) Pemberian izin pengumpulan uang/barang skala Daerah
- t) Pengendalian pengumpulan uang/barang skala Daerah

6. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Malang

Dinas Sosial Kabupaten Malang terdiri dari:

- a) Bidang Bina Swadaya Sosial
- b) Bidang Rehabilitasi Sosial
- c) Bidang Perlindungan dan bantuan Sosial
- d) Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial



Sumber : Buku Pedoman Dinas Sosial Kabupaten Malang

Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Malang

7. Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Malang

7.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dari suatu organisasi. Oleh karena itu sumber daya aparatur suatu organisasi mempunyai pengaruh terhadap berjalannya suatu organisasi. Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang terdiri dari seorang Kepala Dinas, seorang sekretaris, empat orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi, 19 orang staf dan lima orang Tenaga Harian Lepas. Penjelasan mengenai tugas dari masing-masing sumber daya aparatur adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) Memimpin Dinas Sosial dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta menyelenggarakan perizinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang sosial
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Sosial, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi

kegiatan surat menyurat, pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan ;

- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial kabupaten Malang
- (3) Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan
- b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah
- e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan
- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor
- g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi, kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai
- c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan
- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor
- e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran
- f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor
- g) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
- b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran
- c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja Dinas Sosial
- d) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial
- e) Menghimpun, mengolah data menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan
- f) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya

- g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Sosial
- h) Mengkompilasikan dan menyusun laporan, hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Sosial
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan di bidang sosial tingkat daerah
- c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Sosial
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor
- e) Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Sosial
- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan di bidang sosial
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Sosial
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang sosial
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang sosial

- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Bina Swadaya Sosial

(1) Bidang Bina Swadaya Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pembinaan swadaya sosial
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Bidang Bina Swadaya Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial
- b) Pembinaan kesejahteraan anak, remaja dan karang taruna
- c) Pembinaan kesejahteraan keluarga dan lanjut usia
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bina swadaya sosial

Bidang Bina Swadaya Sosial, terdiri dari :

1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
- b) Mempersiapkan bahan sarana dan media serta melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan di bidang sosial
- c) Melakukan penyuluhan sosial untuk membangkitkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta melaksanakan perubahan sosial

- d) Melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial guna penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial
- e) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Swadaya Sosial sesuai dengan bidang tugasnya

2) Seksi Bina Kesejahteraan Anak, Remaja dan Karang taruna mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Kesejahteraan Anak, Remaja dan Karang taruna
- b) Mempersiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan, kesejahteraan anak dan remaja
- c) Menyusun rencana dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan di bidang kesejahteraan anak dan remaja
- d) Melakukan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis kegiatan serta upaya meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja
- e) Melakukan pembinaan dan peningkatan manajemen serta Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan Karang Taruna
- f) Meneliti dan memproses pemberian rekomendasi pengangkatan anak (adopsi anak) dan anak terlantar
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan kesejahteraan anak, remaja dan Karang taruna
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Swadaya Sosial sesuai dengan bidang tugasnya

3) Seksi Bina Kesejahteraan Keluarga dan lanjut Usia mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Kesejahteraan Keluarga dan lanjut Usia
- b) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kesejahteraan keluarga dan lanjut usia
- c) Menyusun rencana dan melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kesejahteraan keluarga (Keluarga Muda Mandiri, Keluarga Rentan/Psikologis, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Komunitas Adat Terpencil) dan Lanjut Usia Terlantar
- d) Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap keluarga dan lanjut usia dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan taraf kesejahteraan sosialMelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan kesejahteran keluarga dan lanjut usia
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Swadaya Sosial sesuai dengan bidang tugasnya

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang Rehabilitasi sosial
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

2) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang cacat
- b) Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang cacat
- c) Pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan daerah kumuh
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
- b) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat (cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu wicara, cacat mental dan bekas penderita penyakit kronis)
- c) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada penyandang cacat
- d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang cacat
- e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang cacat
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang rerehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Bermasalah, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah

- b) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah (anak jalanan, anak nakal, korban penyalahgunaan napza)
 - c) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada anak dan remaja bermasalah
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah
 - e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial, anak dan remaja bermasalah
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Daerah Kumuh mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan daerah kumuh
 - b) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial (tuna susila gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, bekas narapidana, pengidap HIV/AIDS) dan daerah kumuh
 - c) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada tuna sosial dan daerah kumuh
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan daerah kumuh
 - e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan daerah kumuh

- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya

e. Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial

- 1) Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial, mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Dinas sosial di bidang perlindungan dan bantuan sosial
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

- 2) Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pemberian bantuan jaminn sosial depada korban bencana alam
- b) pelaksanaan pemberian rekomendasi pemberian tanda kehormatan / tunjangan pahlawan / perintis kemerdekaan
- c) pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan sosial terhadap korban tindak kekerasan, perlakuan salah, pelanggaran hak asasi manusia, pekerja migran terlantar, keluarga fakir miskin, penyandang cacat berat dan orang terlantar
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan dan bantuan sosial

Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial terdiri dari :

- 1) Seksi Bantuan Korban bencana alam dan Konflik sosial, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun data tentang korban bencana sebagai bahan penyiapan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan konflik sosial

- b) Menghimpun data tentang korban bencana alam dan konflik sosial
 - c) Menyusun rencana kegiatan penanggulangan para korban bencana alam dan konflik sosial
 - d) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanggulangan para korban bencana alam dan konflik sosial
 - e) Melakukan kegiatan pemberian bantuan sosial bagi para korban bencana alam dan konflik sosial
 - f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penggulangan kepada korban bencana alam dan konflik sosial
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya
- 2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
 - b) Menghimpun data, menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan serta usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan
 - c) Melakukan pembinaan, usaha dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan pahlawan / perintis kemerdekaan dan keluarga / ahli warisnya serta pembinaan nilai kepahlawanan
 - d) Menyiapkan bahan dan pemberian rekomendasi pemberian tanda kehormatan / tunjangan pahlawan / perintis kemerdekaan serta melakukan pemeliharaan taman makam pahlwan dan taman makam bahagia

- e) Menggali, merumuskan, mengembangkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat
 - f) Mensosialisasikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawaznana sosial
 - g) Melaksanakan motivasi dan bimbingan penerapan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya
- 3) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
- a) Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Bantuan dan jaminan sosial
 - b) Melakukan identifikasi situasi dan kondiusi sosial, individu/kelompok yang bermasalah atau menjadi korban dan masalah sosial yang mengganggu tata kehidupan sosial serta menerima laporan pengaduan dari masyarakat terutama para korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan pelanggaran hak asasi manusia
 - c) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pemberian bantuan dan jaminan sosial terhadap korban tindak kekerasan, perlakuan salah, pekerja migran terlantar, keluarga fakir miskin, penyandang cacat berat dan orang terlantar



- d) Pemberian bantuan dan jaminan sosial terhadap korban tindak kekerasan, perlakuan salah, pekerja migran terlanjar, keluarga fakir miskin, penyandang masalah cacat berat dan orang terlanjar
- e) Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial
- f) Melakukan identifikasi sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial, khususnya bantuan dan jaminan sosial
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan dan jaminan sosial
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya

2. Jumlah Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur yang ada di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Malang berjumlah 40 orang. Sumber daya aparatur tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan dan juga tingkat pendidikan. Jumlah sumber daya aparatur yang ada di Dinas Sosial apabila dilihat berdasarkan golongan adalah seperti yang dijelaskan oleh tabel 1. Sedangkan jumlah sumber daya aparatur apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti yang dijelaskan oleh tabel 2.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan Tahun 2011

No	Golongan	Jumlah	Presentase
1	II/a	5 Orang	12,5%
2	II.b	0 Orang	0%
3	II/c	0 Orang	0%
4	II/d	3 Orang	7,5%
5	III/a	4 Orang	10%
6	III/b	5 Orang	12,5%
7	III/c	6 Orang	15%
8	III/d	7 Orang	17,5%
9	IV/a	9 Orang	22,5%
10	IV/b	1 Orang	2,5%

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Malang

Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	–	0%
2	SMP	–	0%
3	SMA	18 Orang	45%
4	D-III	3 Orang	7,5%
5	D-IV	–	0%
6	Sarjana (S-I)	13 Orang	32,5%
7	Sarjana (S-2)	6 Orang	15%

Sumber: Data Dinas Sosial Kab

4.2 Hasil Data Fokus Penelitian

4.2.1 Tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten malang

4.2.1.1 Kondisi kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malang

Kabupaten Malang sebagai bagian dari NKRI, saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional tersebut. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dari 38 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan, hanya sedikit yang merupakan daerah datar. Kabupaten Malang berada yang terbagi dalam 33 kecamatan, 390 desa/kelurahan, 3.125 Rukun Warga (RW), dan 14.352 Rukun Tetangga (RT). Dari seluruh desa/kelurahan yang ada, 12 diantaranya berstatus kelurahan dan sisanya 378 berstatus desa. Jika dilihat dari status desa tertinggal, ternyata 41 desa diantaranya merupakan desa tertinggal.

Kepadatan penduduk Kabupaten Malang pada 2009 mencapai 804 jiwa/km². Berdasarkan hasil Susenas, jumlah Penduduk Kabupaten Malang, pada tahun 2009 tercatat sebesar 2.425.311 jiwa. Berdasarkan data BPS Jatim, bahwa 4,8 Juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Malang juga menghadapi masalah serius karena berada dalam posisi kedua sebagai wilayah

termiskin di Jawa Timur dengan jumlah 155.745 Rumah Tangga Sasaran dengan kategori miskin (www.lpm.uin-malang.ac.id > [Berita](#)). Adapun kriteria sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga miskin apabila menurut buku pedoman dinas sosial antara lain :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak berasal dari listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan 1 atau 2 kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas
12. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak sekolah/tidak tamat sd/hanya sd

13. Tidak memiliki tabungan /barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak,kapal motor, atau barang modal lainnya.

14. Sumber penghasilan kepala rumah tangg adalah : petani dengan luas tanah 0,5ha – buruh tani,nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan,atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005) - atau pendapatan perkapita Rp 166.697 per kapita per bulan (2007)

Adapun menurut dinas sosial sebuah rumah tangga atau keluarga dikatakan hampir miskin apabila mencakup kurang dari 5 kriteria keluarga miskin yang dipaparkan sebelumnya, dikatakan hampir miskin apabila mencakup lebih dari 5 dan kurang dari 10 kriteria keluarga miskin, dan dikatan sangat miskin apabila mencakup kurang dari 5 dan lebih dari 10 kriteria yang dipaparkan oleh data milik dinas sosial diatas. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh ER selaku warga kecamatan pagak bahwa :

“Penghasilan saya tidak tetap mas terkadang sebulan tidak sampai 150rb karena pekerjaan saya hanya merawat hewan ternak milik orang,saya tidak bisa mencari pekerjaan lain karena saya hanya tamatan SD dan yang bisa mas lihat rumah saya sendiri hanya berbahan gedeg”

(Sumber: wawancara, senin 5 Maret 2012 pukul 13.00 WIB)

Tabel 3. Persebaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Malang tahun**2011**

Kec / Desa	Rumah Tangga			Jumlah
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	
1. Kecamatan Donomulyo	484	1.51	2.041	4,035
2. Kecamatan Kalipare	551	1,728	1,611	3,890
3. Kecamatan Bantur	348	1,495	2,423	4,266
4. Kecamatan Pagak	598	1,619	1,145	3,362
5. Kecamatan Gedangan	217	959	1,327	2,503
6. Kecamatan Sumbermanjing Wetan	503	1,739	2,320	4,562
7. Kecamatan Dampit	862	2,611	3,902	7,375
8. Kecamatan Tirtoyudo	294	1,527	2,460	4,281
9. Kecamatan Ampelgading	319	1,252	2,415	3,986
10. Kecamatan Ponsokusumo	1,501	3,532	2,874	7,907
11. Kecamatan Wajak	1,170	2,776	1,638	5,584
12. Kecamatan Turen	1,014	2,559	3,123	6,696
13. Kecamatan Bululawang	634	1,861	2,073	4,568
14. Kecamatan Gondanglegi	879	2,086	2,275	5,240
15. Kecamatan Pagelaran	1,113	1,791	1,355	4,259
16. Kecamatan Kepanjen	736	2,019	2,698	5,453
17. Kecamatan Sumberpucung	888	1,445	839	3,172
18. Kecamatan Kromengan	328	940	1,202	2,470
19. Kecamatan Ngajum	382	1,318	1,337	3,037
20. Kecamatan Wonosari	238	929	2,232	3,399
21. Kecamatan Wagir	640	940	840	2,420
22. Kecamatan Pakisaji	479	1,266	1,664	3,409
23. Kecamatan Tajinan	582	1,930	2,446	4,958
24. Kecamatan Tumpang	1,495	3,478	2,098	7,071
25. Kecamatan Pakis	1,747	3,781	3,053	8,581
26. Kecamatan Jabung	1,384	3,233	2,073	6,690
27. Kecamatan Lawang	543	1,518	2,323	4,384
28. Kecamatan Singosari	1,350	3,457	2,400	7,207
29. Kecamatan Karangploso	354	1,399	2,677	4,430
30. Kecamatan Dau	279	972	1,465	2,716
31. Kecamatan Pujon	1,331	2,271	1,431	5,033
32. Kecamatan Ngantang	515	2,073	2,744	5,332
33. Kecamatan Kasembon	478	1,456	1,535	3,469
Total	24,236	63,470	68,039	155,745

(Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Malang)

Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh S selaku staf seksi bidang rehabilitasi sosial bahwa :

“Lima Kecamatan yaitu Kecamatan Dampit, Kecamatan Singosari, Kecamatan Turen, Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Pakis dimana kecamatan ini banyak terdapat RTM (Rumah Tangga Miskin).”

(Sumber: wawancara, senin 5 Maret 2012 pukul 09.00 WIB)

Dengan tingginya angka kemiskinan di kabupaten malang yang juga menyebabkan munculnya PMKS maka diperlukan bantuan dari TKSK selaku mitra kerja dinas sosial dalam membantu usaha kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh dinas sosial.

4.2.2 Peran TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial

4.2.2.1 Tugas dan Fungsi TKSK

Keberadaan sukarelawan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sangat strategis dalam menyukseskan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Tanah Air. TKSK boleh dikatakan paling tahu tentang kondisi sesungguhnya keluarga miskin atau PMKS yang ada di desa-desa di wilayah kecamatan tugasnya.

Mereka ikut terlibat dalam membimbing keluarga miskin atau PMKS penerima bantuan agar dapat memanfaatkan bantuan dengan baik, bahkan mengembangkan bantuan itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan buku pedoman TKSK milik dinas sosial peran TKSK ini antara lain :

1. Identifikasi dan inventarisasi PMKS dan PSKS, pada tahap ini TKSK berkeliling desa di kecamatan dimana dia ditempatkan dengan bekerjasama dengan organisasi di kecamatan tersebut seperti PMS maupun karang taruna dan bantuan dari perangkat kecamatan/desa setempat, kemudian hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan diserahkan kepada dinas sosial untuk kemudian ditindak lanjuti dimana pihak penerima bantuan diseleksi secara ketat dan dipilih antara 15-20 orang, hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh I selaku kepala bidang di bidang Bidang Bina Swadaya Sosial bahwa :

“karena keterbatasan anggaran yang kita punya, maka tiap tahunnya hanya ada sekitar 15-20 orang dari beberapa PMKS. Oleh karena itu pesertanya kita seleksi secara ketat.”

(sumber: wawancara, 5 Maret 2012 pukul 13.00 WIB)

2. Bimbingan dan penyuluhan sosial, penyuluhan sosial disini adalah penyuluhan yang dilakukan kepada warga kecamatan yang terpilih mendapatkan bantuan dari dinas sosial, penyuluhan biasanya dilakukan sebelum penyerahan bantuan dimana pihak dinas sosial dan TKSK melakukan pemberian

bekal bekal dan syarat syarat dari pemberian bantuan oleh dinas sosial,TKSK sendiri tidak sendirian dalam melakukan penyuluhan, selain dari pihak dinas sosial TKSK juga mendapat support dari perangkat kecamatan serta dari intitusi pendidikan seperti Universitas Brawijaya. Bimbingan sosial disini TKSK melakukan bimbingan pada PMKS yang sudah terdata dan terpilih untuk mendapatkan bimbingan, bimbingan sosial yang dilakukan oleh TKSK biasanya dilakukan dalam bentuk kelompok yang disebut dengan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), bimbingan sosial melalui KUBE ini dilakukan bertujuan agar kegiatan usaha yang tadinya dilakukan perorangan dapat dikembangkan dalam kelompok sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring,serta pembinaannya akan lebih efektif efisien baik dari segi biaya,waktu dan tenaga yang digunakan.

3. Pembinaan PMKS dan PSKS
4. Berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial termasuk didalamnya monitoring, evaluasi dan pelaporan disini TKSK melakukan monitoring pihak penerima bantuan selama 6-8 bulan dan selepas masa tersebut TKSK melakukan pelaporan kepada pihak dinas sosial hasil dari monitoring tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi secara bersama sama dengan pihak

dinas sosial dan kecamatan setempat.

4.2.2.2 Pelaksanaan Peran TKSK di Wilayah Kerja

Pelaksanaan tugas TKSK akan dilihat berdasarkan kedudukan, tupoksi TKSK sesuai dengan UU Kesos tahun 2009 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan uraian kegiatan yang dilaksanakan diwilayah kerjanya dan kemudian akan dikonfirmasikan dengan kegiatan yang senyatanya dalam wilayah kerjanya. Berdasarkan uraian kegiatan TKSK antara lain :

1. Identifikasi dan inventarisasi PMKS dan PSKS dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi PMKS dan PSKS TKSK melakukan pendekatan awal, pendekatan awal yang dilakukan oleh TKSK melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Mengadakan kontak pendahuluan dimana kontak pendahuluan dilakukan ketika ditemukan PMKS di wilayah kerja TKSK.
 - b. Melakukan orientasi penjajagan awal,hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan calon klien serta pencarian data dari sasaran penerima bantuan usaha kesejahteraan sosial.
 - c. Menyiapkan/menyusun pokok-pokok program

Berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan tugas TKSK apabila dikonfirmasi dengan kenyataan tugas di lokasi kerjanya bahwa

dari jenis kegiatan yang ada yang dilaksanakan baru mengadakan kontak pendahuluan dan penjajagan awal,dalam hal pengumpulan data ini didahului dengan kontak pendahuluan dengan pamong desa/lurah setempat dan dilanjutkan dengan penjajagan awal. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala desa Gampingan RI bahwa :

”Iya mas TKSK memang selalu berkoordinasi dengan saya karena kan yang punya data warga disini cumak di desa dan kelurahan setempat baru para TKSK melakukan penjajagan awal ke calon calon penerima bantuan”

(sumber : wawancara, 19 April 2012 pukul 11.00 WIB)

Kegiatan pengumpulan data dan penjajagan awal ini diserahkan kepada TKSK dengan asumsi bahwa TKSK adalah seorang professional pekerja sosial yang bekerja di lapisan paling bawah sehingga dengan demikian akan mempermudah perolehan informasi yang benar dan tepat tentang masalah masalah sosial yang ada di wilayahnya.

Sedangkan untuk kegiatan penyusunan pokok pokok program dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya diikuti dalam penyusunan program. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh T selaku koordinator TKSK kabupaten Malang bahwa :

”Memang saat ini tidak semua TKSK dilibatkan sepenuhnya dalam penyusunan program,tugas penyusunan program biasa dilakukan oleh pihak dinas sosial dan kemudian baru dikoordinasikan dengan pihak kecamatan atau desa”

(Sumber: wawancara, senin 5 Maret 2012 pukul 09.00 WIB)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh T terkesan bahwa TKSK hanya sebagai tenaga pengumpul data, sedangkan untuk tugas pelaksana sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan proyek. Kondisi dan situasi seperti ini memberikan kesan bahwa TKSK kurang berfungsi sehingga merugikan TKSK sendiri maupun masyarakat.

Dalam rangka pendataan PMKS dan PSKS secara ideal TKSK harus melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

a. Persiapan yang meliputi :

- 1) Penyusunan rencana pendataan
- 2) Menghubungi kepala desa/lurah
- 3) Menyusun instrument pendataan

b. Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan pengumpulan data
- 2) Menghimpun dan mengecek pengisian instrument/formulir yang telah diisi
- 3) Mengelola data yang terkumpul menjadi informasi
- 4) Menyusun dan menyampaikan hasil data laporan ke dinas sosial kabupaten malang

Untuk pendataan PMSK dan PSKS secara rinci apabila disesuaikan dengan kenyataan tidak berjalan dengan semestinya,

hal ini terlihat dalam pendataan tidak dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, tetapi dilakukan langsung dengan menghubungi kepala desa untuk berkonsultasi mengenai kondisi masyarakat di wilayah kerjanya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala desa Gampingan RI bahwa :

“ Biasanya jika ada bantuan dari dinas sosial maupun propinsi TKSK disini meminta data masyarakat disini kepada saya baru kemudian TKSK melakukan inventarisasi warga mana yang layak mendapat bantuan dengan bantuan PSM dan Karang Taruna”

(sumber : wawancara, 19 April 2012 pukul 11.00 WIB)

Hal yang sama juga dikatakan oleh TKSK kecamatan Pagak S bahwa :

“ Biasanya saya memang kalau ada bantuan dari dinas sosial atau dari propinsi langsung ke kepala desa mas soalnya kalau mendata satu satu makan waktu lama mas waktunya gak nutut”

(Sumber: wawancara, senin 5 Maret 2012 pukul 09.00 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat diambil benang merah bahwa dengan dilakukannya pendataan tanpa membuat rencana terlebih dahulu sangat dimungkinkan karena waktu yang tersedia bagi TKSK relative singkat hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan dari TKSK maupun masyarakat untuk melaksanakan program program peningkatan kesejahteraan sosial dalam arti kesiapan mereka baru terjadi saat program bantuan akan diterapkan . Dalam kegiatan tersebut TKSK bersama sama dengan PSM dan

Karang Taruna desa setempat melakukan kegiatan pengumpulan data, kemudian mengolah dan menginformasikan hasil pengumpulan data tersebut ke dinas sosial Kabupaten Malang.

2. Bimbingan dan penyuluhan sosial

Bimbingan dan penyuluhan sosial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan

Persiapan dari bimbingan sosial dimulai dengan mengirimkan surat kepada kepala desa setempat untuk kemudian kepala desa memberitahukan akan adanya bimbingan sosial dari Dinas Sosial kepada sasaran bimbingan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial selalu dilakukan dalam rangka memotivasi penerima pelayanan untuk mengikuti program-program kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial seringkali dalam bentuk kegiatan penyuluhan maupun pelatihan yang diberikan baik oleh dinas sosial maupun instansi lain terkait disesuaikan dengan jenis bantuan maupun jenis PMKS yang disandang oleh klien dimana kegiatan ini dilakukan secara berkala setelah klien menerima bantuan yaitu 3x dalam 3

bulan.

3. Pembinaan PMKS dan PSKS

Tugas TKSK selanjutnya disebutkan sebagai Pembina PMKS, tugas pembinaan PMKS dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan penerima pelayanan
- b. Mepersiapkan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial contohnya panti asuhan, lembaga rehabilitasi panti wredha tergantung dengan jenis pelayanan.
- c. Mengorganisasikan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas TKSK sudah menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam kegiatan pengorganisasian usaha kesejahteraan sosial dimana TKSK melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh dinas sosial yaitu dengan mendata masyarakat calon penerima program kesos dari dinas sosial maupun propinsi. Sedangkan dalam persiapan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan pembinaan terhadap PMSKS dan PSKS hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Samsul Hadi selaku kepala seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.

“Kami bila ada kegiatan penyuluhan dan bimbingan di desa desa selalu melibatkan TKSK dalam kegiatan ini karena mereka yang paling tahu kondisi PMSKS dan PSKS di desanya”

(sumber : wawancara, 5 Maret 2012 pukul 11.00 WIB)

Untuk perisapan penerima pelayanan dilakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut : pendataan anak jalanan, pendataan keluarga miskin, pendataan PACA, pendataan ex napi serta memberikan motivasi kepada calon penerima pelayanan .

Selanjutnya dikatakan bahwa tugas TKSK adalah melakukan pembinaan PSKS, pembinaan PSKS meliputi antara lain :

- a. Menentukan potensi serta sumber kesejahteraan sosial
- b. Mempersiapkan PSKS untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial
- c. Pelaksanaan pembinaan PSKS, meliputi :
 - 1) Membina dan mengembangkan kegiatan organisasi sosial
 - 2) Membimbing PSM dan relawan sosial
 - 3) Membina karang taruna

Dilihat dari proses kegiatan satu persatu untuk kegiatan penentuan potensi serta sumber kesejahteraan sosial TKSK menentukan dari organisasi yang di wilayah kerja TKSK, masih berkaitan dengan kegiatan penentuan PSKS adalah kegiatan persiapan PSKS untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dimana normalnya dilakukan secara terpisah sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama serta tentu membutuhkan biaya dan tenaga ekstra, oleh karena itu TKSK bersama dinas

sosial melaksanakan kegiatan penentuan dan persiapan PSKS dalam rangka untuk peningkatan usaha kesejahteraan sosial secara bersama sama. Untuk kegiatan pembinaan PSKS, TKSK masih bekerja sama dengan dinas sosial untuk melakukan bimbingan karena keterbatasan tempat dan biaya dari dinas sosial biasanya kegiatan bimbingan ini dilakukan di kantor dinas sosial kabupaten malang dengan memberikan undangan kepada karang taruna atau PSM atau relawan sosial lainnya ketika akan dilakukan bimbingan. Hal ini senada dengan pernyataan kepala dinas sosial kabupaten Malang Ibu AP bahwa :

“Kalau mau melaksanakan kegiatan kegiatan bimbingan PSKS biasanya kami lakukan di kantor sini saja mas dengan mengirimkan undangan ke relawan sosial untuk datang menghadiri bimbingan tersebut, karena lebih efektif dan ekonomis daripada harus nyewa tempat”

(sumber : wawancara, 5 Maret 2012 pukul 11.00 WIB)

Adapun kegiatan pembinaan yang telah dilakukan TKSK bekerjasama dengan dinas sosial selama tahun 2011 :

Tabel 4. Kegiatan Pembinaan 2011

no	jenis kegiatan	keterangan
1	Pembinaan forum PSM	2 kali
2	Motivasi calon klien/seleksi	14 kali
3	ceking dan pembinaan penerima bantuan	10 kali
4	Pembinaan anak asuh dan anak terlantar	4 kali
5	Pembinaan generasi muda	2 kali
6	Pembinaan lanjut anak nakal korban narkoba	5 kali
7	Pembinaan wts	6 kali
8	Penyuluhan Karang Taruna	2 kali
9	Pembinaan gelandangan	6 kali
10	konsultasi dengan kelurahan tentang PACA	3 kali

4. Berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial, TKS K mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pimpinan proyek dalam persiapan pelaksanaan proyek kesejahteraan sosial
- b. Membantu pimpinan proyek dalam pelaksanaan proyek kesejahteraan sosial

Dari kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kerjanya kegiatan membantu persiapan pelaksanaan proyek tersebut sering dilakukan dengan mempersiapkan calon penerima pelayanan dengan melakukan motivasi, konsultasi dengan kepala desa, hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa TKS K sebagai tenaga lapangan akan sangat mengerti kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya, sedangkan dalam membantu pimpinan proyek ketika pelaksanaan proyek biasa dilakukan TKS K dengan membantu melakukan koordinasi dengan pimpinan proyek ketika proyek dilangsungkan. Dalam kegiatan membantu tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial, TKS K sendiri biasa dibantu oleh organisasi sosial baik itu karang taruna dimana terdapat maupun panti panti yang ada dimana proyek usaha kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan. Dimana peran TKS K bersama karang taruna dalam proyek adalah mendata dan menyiapkan calon

penerima program yang ada dalam proyek dari dinas sosial, terkadang peran dari TKSK sama dengan peran karang taruna dalam sebuah proyek dikarenakan terkadang seorang TKSK juga merangkap sebagai koordinator di karang taruna di wilayah kerjanya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh AP selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang bahwa :

“Dalam setiap kegiatan bantuan yang dilaksanakan dinas sosial TKSK dan selalu dimintai bantuan oleh kami dalam proses berlangsungnya proyek tsb karena dinas sosial meyakini yang paling mengerti kondisi dan kemauan calon penerima pelayanan hanyalah mereka(TKSK)”

(sumber : wawancara, 5Maret 2012 pukul 11.00 WIB)

4.2.3 Faktor yang Mempengaruhi TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

4.2.3.1 Faktor Penghambat TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

Dalam satu kecamatan di kabupaten Malang terdapat beberapa desa, dimana desa-desa tersebut merupakan wilayah kerja dari TKSK, dalam rangka pelaksanaan tugas dari seorang TKSK, banyak diantara TKSK yang mengalami hambatan. Hambatan yang kerap ditemui oleh TKSK antara lain :

1. Transportasi

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang memadai akan

mendukung kelancaran tugas dan kegiatan yang dilakukan. Sebaliknya, kegiatan yang dilakukan tanpa saran dan prasarana akan menjadi hambatan bagi kelancaran tugas dan kegiatan.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang berada pada posisi terdepan dalam mengemban tugas pembangunan kesejahteraan sosial membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dari semua TKSK di Kabupaten Malang melakukan kegiatannya sebagai TKSK dengan menggunakan sepeda motor pribadi, dimana setiap bulannya TKSK mendapat dana yang disebut tali asih sebesar Rp 250.000,- . Jumlah sebesar itu tentu dirasa belum layak untuk kinerja dan peran TKSK di kabupaten Malang.

Akan tetapi didorong oleh semangat dan dedikasi dari para TKSK mereka tetap bekerja dengan semangat yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Geografis dan Cuaca

Letak geografis dan cuaca memang tidak bisa disalahkan dalam kegiatan dan tugas sebagai TKSK tapi dilihat dari kondisi geografis kecamatan kecamatan di kabupaten malang terutama di malang selatan tentu kondisi geografis semacam itu masih sungguh memprihatinkan dan menghambat mobilitas TKSK dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saudara K selaku TKSK di kecamatan

sumbermanjing wetan bahwa :

“bagi saya pribadi dan teman teman TKSK di wilayah malang selatan yang paling menghambat kegiatan kami adalah kondisi geografis di desa desa sini mas karena jalannya masik berupa bebatuan dan ada daerah daerah yang belum ada penerangannya”

3. Waktu

Hambatan lainnya dari pelaksanaan tugas TKSK yaitu ketika waktu malam hari khususnya untuk TKSK wanita, karena mereka harus melakukan pekerjaan melebihi yang seharusnya meskipun pekerjaan itu untuk membantu program dinas sosial maupun kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh YT selaku TKSK kecamatan tirtoyudo bahwa :

“Kami TKSK wanita sangat kesulitan mas kalau harus melakukan pekerjaan ketika malam hari karena jalan jalan di desa kalo sudah malam itu sudah gak ada penerangan lagi mas,biasanya saya diantar suami kalo ada pekerjaan yang harus dilakukakn malam hari”

Akan tetapi bagi TKSK pria ada yang mengemukakan pengalaman kerja mereka ketika malam hari sangat menyenangkan dan berkesan, dimana TKSK bekerja sama dengan pihak kepolisian bergabung dalam razia anak jalan dan wanita tuna susila. Merupakan suatu kebanggaan bagi TKSK yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan sosial yang ada di wilayah kerjanya. Misalnya yang dialami oleh Y selaku TKSK kecamatan Wonosari ketika mengikuti razia WTS bahwa :

“Ketika itu saya berbincang dengan WTS yang terjaring razia sebenarnya mereka tidak mau bekerja seperti ini tapi bagaimana lagi, keterampilan tidak punya suami juga pengangguran sementara umur sudah tidak produktif lagi untuk melamar pekerjaan, namun akhirnya melalui beberapa prosedur akhirnya dinas dosial kabupaten malang bersama dinas sosial provinsi memberikan bimbingan dan modal keterampilan kepada beberapa WTS”

(sumber : wawancara, 5 Maret 2012 pukul 11.00 WIB)

4. Tidak Terbukanya Pemilik Data

Kendala yang lain dari kegiatan dan tugas sebagai TKSK yang lain yaitu tidak terbukanya pemilik data terhadap kondisi sebenarnya dari PMKS yang ada di wilayah kerja TKSK, hal itu disebabkan karena apabila data tersebut ditampilkan maka nama wilayah kecamatan akan merosot, hal tersebut akan menyulitkan TKSK yang akan melakukan penanganan karena kebanyakan masalah yang ada di setiap kecamatan adalah masalah kesejahteraan keluarga dan pada kenyataannya masalah tersebut berkaitan dengan masalah kemiskinan dan apabila satu masalah diangkat maka masalah lain akan bermunculan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh FA selaku TKSK kecamatan singosari bahwa :

“ Ketidakterbukaan dan ketidakpercayaan perangkat desa kepada TKSK dalam memberikan data yang kami perlukan benar benar menjadi hambatan tersendiri bagi kami karena data yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang saya dan teman teman TKSK lihat di kenyataannya”

(sumber : wawancara, 5 Maret 2012 pukul 11.00 WIB)

4.2.4.2 Faktor Pendukung TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

Seperti diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai TKSK sering ditemui hambatan-hambatan oleh karena TKSK diberikan berbagai pendukung pelaksanaan tugas baik fisik maupun non fisik, antara lain :

1. Pendukung fisik antara lain berupa :

a. Mesin Ketik

Mesin ketik sebagai salah satu alat tulis yang diberikan kepada TKSK dan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membuat catatan atau kasus dari penerima pelayanan. Kasus atau catatan itu dapat berisi tentang kondisi dan perkembangan penerima pelayanan. Hal ini perlu dilakukan sebagai catatan untuk evaluasi hasil kerja yang sudah dilakukan, dan akhirnya dapat menentukan bentuk bentuk pelayanan selanjutnya.

b. Sound System

Seperti diketahui sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang saat ini paling efektif adalah Sound System ,karena dalam kegiatan penyuluhan masyarakat TKSK dapat menggunakan alat tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan,

c. Meja,kursi dan ruang kerja dimana ruang kerja TKSK

berada di sebuah ruangan di dinas sosial dimana ruangan ini biasa digunakan berkumpul bagi para TKSK untuk berkoordinasi selain itu ruang kerja TKSK di kecamatan dia berdomisili ada di kantor karang taruna karena kebanyakan TKSK juga berasal dari unsur karang taruna kecamatan/desa setempat.

- d. Alat komunikasi, alat komunikasi ini berupa handy talkie yang digunakan oleh TKSK untuk melakukan koordinasi dengan panitia panitia yang terlibat dalam suatu kegiatan yang terkait dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang.
- e. Papan data, papan data ini menunjukkan data jumlah PMKS yang ada di kecamatan wilayah kerja TKSK, adapun papan data ini terletak di kantor kecamatan tempat TKSK berdomisili.

2. Faktor pendukung non fisik

Faktor pendukung nonfisik dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu tentang keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan termasuk di dalamnya pemberian sertifikat kelulusan pengetahuan dasar dan keahlian dasar untuk melaksanakan tugas sebagai TKSK, kewenangan dalam menyelesaikan masalah sosial, motivasi, dan kedekatan dengan warga sekitar.

a. Pelatihan

Keikutsertaan TKSK dalam kegiatan pelatihan akan mendapatkan pemberian sertifikat yang bertujuan antara lain:

(1) memberikan tanda legalitas kepada seorang TKSK (2) menyatakan tingkat kompetensi TKSKS untuk melaksanakan tugas dibidang usaha kesejahteraan sosial (3) menyatakan ruang lingkup kewenangan secara fungsional dalam melaksanakan tugas sebagai TKSK (4) Meningkatkan harkat dan martabat serta profesionalisme TKSK. Pelatihan yang bersifat administratif dengan materi pelatihan antara lain berupa wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kedisiplinan, PMKS dan PSKS, teknik pemetaan, identifikasi dan inventarisasi PMKS dan PSKS, teknik bimbingan dan penyuluhan sosial, teknik komunikasi dan pemanfaatan relasi sosial, pemberdayaan sosial, pengetahuan dan keterampilan dasar pekerjaan sosial. Dari berbagai jenis latihan yang telah diberikan ternyata telah memberikan manfaat bagi TKSK, walaupun manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara optimal. Dalam arti pemanfaatan teori ketika pelatihan perlu disesuaikan dengan kondisi senyatanya di lapangan. Hal ini terlihat pada saat pengumpulan data, seorang TKSK dapat menunjukkan beberapa catatan dan memberikan keterangan secara jelas mengenai cara cara mendekati penerima pelayanan

sosial dan kesulitan kesulitan serta kemudahan yang diperoleh.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh T selaku koordinator TKSK bahwa :

“Dengan adanya pelatihan yang berisikan teori teori dari dinas sosial provinsi jatim maupun kabupaten malang membuat keilmuan kami selaku TKSK dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah, walaupun tidak semua materi pelatihan bisa kami terapkan secara 100%”

(sumber : wawancara, 29 Januari 2013 pukul 09.00 WIB)

b. Pemberian kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial di wilayah kerjanya

Seperti diketahui bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah mutlak diperlukan. Dengan arti tanpa mengecilkan peran PSM sebagai pekerja sosial yang ada di tingkat desa seorang TKSK diberi kewenangan untuk berkomunikasi secara langsung dengan penerima atau calon penerima layanan. Komunikasi yang dimaksud dimulai dengan pendekatan kepada calon penerima pelayanan;membuat persetujuan tentang metode yang akan dipergunakan dalam penyelesaian masalah;dan penentuan jenis pelayanan yang akan diberikan. Termasuk didalamnya adalah koordinasi dengan instansi terkait sebagai mitra TKSK. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh AP selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang bahwa :

“Untuk memudahkan kinerja TKSK dilapangan merka diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang mereka temui demi kelancaran usaha peningkatan kesejahteraan sosial di kabupaten Malang, sehingga bila TKSK menemui permasalahan sosial di wilayah kerjanya, mereka bisa langsung memberikan pertolongan secepatnya.”

(sumber : wawancara, 29 Januari 2013 pukul 10.00 WIB)

Dengan diberikannya kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di wilayah kerjanya diharapkan seorang TKSK bertemu dengan seorang calon penerima layanan yang menyanggah lebih dari 1 permasalahan sosial. Sebagai contoh seorang calon penerima pelayanan adalah seorang yang miskin, cacat dan mempunyai anak putus sekolah, dalam menghadapi kesulitan dan hambatan hambatan yang sudah disebutkan sebelumnya ada alternatif yang dilakukan oleh TKSK antara lain :

- 1) Berkonsultasi dengan lurah, RT/RW atau camat setempat.
- 2) Mengadakan koordinasi atau konsultasi dengan pihak dinas sosial kabupaten Malang
- 3) Koordinasi dan konsultasi dengan organisasi sosial seperti PSM, PKK ataupun panti panti sosial
- 4) Memberikan motivasi dengan memberikan kesadaran bahwa penerima atau calon penerima pelayanan bukanlah orang yang dibiarkan sendiri untuk

menyelesaikan masalah, melainkan mereka bersama TKSK memecahkan masalah yang dialaminya, metode pemecahan masalah ini diakui para TKSK metode yang paling sulit karena menurut mereka memotivasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran membutuhkan waktu yang lama serta terus menerus, dengan melibatkan lingkungan keluarga terdekat atau keluarga inti.

c. Motivasi

TKSK di Kabupaten Malang dimana dalam melaksanakan tugas sebagai TKSK, Kemensos menetapkan operasional sebesar 250.000. padahal sebagai manusia, TKSK pun memiliki kebutuhan terhadap Sandang, Pangan dan Papan. Di daerah-daerah tertentu seperti Aceh, Pemerintah daerah menyambut hal ini dengan memberikan dana yang diambil dari APBD untuk '*memanusiawikan*' pendapatan TKSK. Sementara di daerah-daerah yang lain, termasuk kabupaten Malang Pemerintah Daerah kebanyakan menutup mata terhadap hal ini. Padahal dari kebutuhan membuat Form pendataan, pelaporan dan transportasi saja, operasional TKSK yang disebut tali asih itu masih jauh dari mencukupi. Ada sebuah anekdot yang pernah dilontarkan oleh keluarga TKSK. Di saat TKSK tersebut sedang melakukan pendampingan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), istrinya menelpon dan berkata “

rumah orang lain di bagusin, rumah sendiri retak-retak ga dibenerin”. Atau anekdot lain, saat TKSK bertugas mendata dan kemudian mendampingi bantuan Program Anak Terlantar, tapi SPP putra-putri TKSK tersebut menunggak berbulan-bulan. Miris memang melihat kenyataan tersebut akan tetapi ditengan kekurangan tersebut TKSK tetap bekerja sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial dan mitra Dinas Sosial Kabupaten Malang.

d. Kedekatan TKSK dengan warga sekitar dan Stakeholder

Faktor kedekatan TKSK dengan warga sekitar serta stakeholder dalam usaha meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial di kabupaten malang sangatlah berpengaruh karena TKSK ditunjuk berdasarkan dimana ia beromisili sehingga secara personal sudah dikenal dengan warga sekitar dan kepercayaan terhadap TKSK pun sudah tumbuh sehingga memudahkan TKSK ketika akan melakukan tugasnya seperti ketika dalam penginventarian jumlah PMKS yang ada di wilayah kerjanya para penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak malu untuk mengungkapkan apa saja yang dibutuhkan TKSK karena mereka tahu bahwa TKSK melakukan tugasnya untuk membantu mereka. Hal ini sesuai

dengan yang disampaikan oleh R selaku warga desa gampingan bahwa :

“Bagi saya pribadi jika saya lebih bisa terbuka berbicara apa adanya mengenai kondisi saya ketika TKSK melakukan pendataan daripada bila pendataan dilakukan oleh petugas kecamatan karena ada kedekatan personal dengan TKSK dibandingkan dengan petugas kecamatan.”

(sumber : wawancara, 5 Maret 2012 pukul 11.00 WIB)

4.3 Pembahasan Data Fokus Penelitian

4.3.1 Tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten malang

4.3.1.1 Kondisi kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Malang

Menurut Fred W. Riggs (1971) mengatakan bahwa Sederhananya peristilahan administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melakukan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Ungkapan peristilahan tersebut analog dengan istilah-istilah seperti administrasi pertanian, administrasi pendidikan dan organisasi kesejahteraan sosial, yang masing-masing meliputi suatu usaha terorganisasikan untuk melaksanakan program pertanian, pendidikan, dan program-program kesejahteraan sosial, dari teori diatas kesejahteraan sosial merupakan salah satu sasaran dari administrasi pembangunan dimana Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah dengan

jumlah rumah tangga miskin yang terbesar di Jawa Timur. Dari data yang diperoleh peneliti, jumlah masyarakat miskin dan sangat miskin yang ada di Kabupaten Malang masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Malang mengadopsi fenomena yang disebut masalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial adalah permasalahan yang disebabkan ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial karena adanya rintangan maupun hambatan-hambatan dalam mewujudkan nilai-nilai, aspirasi, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Malang masih tergolong rendah tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan yang rendah ini dapat dilihat dengan masih banyaknya jumlah Rumah Tangga Miskin dan rumah Tangga Sangat Miskin yang ada di Kabupaten Malang dimana terdapat 155.745 keluarga. Sebagai instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial mempunyai fungsi utama melakukan usaha untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Horton dan Leslie menyatakan bahwa “ masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif ” (Suharto, 2008:71).

Teori ini membuktikan bahwa dalam memecahkan sebuah masalah sosial dituntut kerjasama dari berbagai pihak dan tidak bisa

hanya mengandalkan salah satu pihak saja. Dinas Sosial Kabupaten Malang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk melaksanakan semua program kerja yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Salah satu pihak yang perannya dirasa sangat vital dan penting adalah Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK). Hal ini dikarenakan TKSK merupakan agen dari Dinas Sosial yang berada langsung di daerah yang terkena masalah sosial. Ini berarti bahwa TKSK setempat lebih memahami dan mengetahui akar dari masalah sosial yang melanda daerah tersebut.

TKSK merupakan ujung tombak dari upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Malang, karena TKSK memiliki peran dalam hampir semua program Dinas Sosial Kabupaten Malang yang ditujukan untuk pengentasan masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itulah untuk semakin meningkatkan dan memaksimalkan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Malang, maka peran TKSK masih perlu dioptimalkan lagi. Komunikasi dan kerjasama antara pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang beserta seluruh TKSK yang ada di semua Kecamatan di Kabupaten Malang harus digalang lebih erat lagi. TKSK juga sangat penting guna mengatasi terbatasnya Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Dengan luas wilayah yang sangat besar maka tidak mungkin bagi staf Dinas Sosial untuk mengurus dan mengatasi semua masalah sosial yang ada di wilayah Kabupaten Malang, oleh karena itulah peran TKSK sangat penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Malang. Dalam upaya penanggulangan PMKS, TKSK tiap Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk menganalisa, memilah dan menyeleksi siapa saja yang pantas menerima program usaha kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. Disinilah peran penting dari TKSK karena jika kinerja TKSK kurang memuaskan maka bisa dipastikan bantuan dari pemerintah akan salah sasaran.

4.3.2 Peran TKSK dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial

4.3.2.2 Pelaksanaan Peran TKSK di Wilayah Kerja

Pelaksanaan tugas TKSK sendiri dapat dilihat berdasarkan kedudukan, tupoksi TKSK sesuai dengan buku pedoman TKSK yang pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil penelitian serta uraian kegiatan yang dilaksanakan diwilayah kerjanya dan kemudian akan dikomfirmasikan dengan kegiatan yang senyatanya dalam wilayah kerjanya. Menurut International Federation of Social Workers(IFSW) dalam (Tan dan Envall, 2000:5) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai “Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan,perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan

manusia,serta perbaikan masyarakat”.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa peran pekerja sosial terkait perbaikan fungsi sosial masyarakat, dimana terdapat 2 metode pendekatan yang dapat digunakan oleh pekerja sosial dalam kegiatan perbaikan fungsi sosial yaitu metode pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro merujuk pada berbagai keahlian pekerjaan sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu, keluarga dan kelompok. Dua metode utama yang biasa diterapkan oleh pekerja sosial dalam setting mikro ini adalah terapi perseorangan dan terapi kelompok. Pendekatan makro adalah penerapan metoda dan teknik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi sosial. Tiga metoda utama dalam pendekatan makro adalah terapi masyarakat, manajemen pelayanan kemanusiaan, dan analisis kebijakan sosial. Pendekatan yang sering digunakan oleh TKSK dalam memberikan membimbing para pelaku PMKS adalah dengan menggunakan pendekatan mikro dengan metode terapi kelompok dimana bimbingan sosial disini TKSK melakukan bimbingan pada PMKS yang sudah terdata dan terpilih untuk mendapatkan bimbingan, bimbingan sosial yang dilakukan oleh TKSK sering kali dilakukan dalam bentuk kelompok yang disebut dengan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), bimbingan sosial melalui KUBE ini

dilakukan bertujuan agar kegiatan usaha yang tadinya dilakukan perorangan dapat dikembangkan dalam kelompok sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring, serta pembinaannya akan lebih efektif efisien baik dari segi biaya, waktu dan tenaga yang digunakan.

Dalam Proses pertolongannya peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara umum peran pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.

Dalam hal ini TKSK melakukan beberapa terapi baik itu terapi keluarga, bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi kliennya dari kegiatan ini tampak peran TKSK sebagai konselor. Selain itu menurut (Kartasmita, 1997:15-17) untuk dapat menjalankan misinya dalam hal ini misi dinas sosial kabupaten malang menanggulangi masalah kesejahteraan sosial diperlukan pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk

membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Hal ini sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh TKSK dimana dalam pekerjaannya selaku TKSK, mereka melakukan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial ketika diberikan bantuan oleh dinas sosial kabupaten malang maupun provinsi jawa timur, dimana TKSK selalu mendampingi mereka baik itu ketika pembinaan maupun setelah pembinaan.

2. Menghubungkan orang dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, pada fungsi ini dalam membantu klien agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan jejaring dengan organisasi sosial yang ada di

Kabupaten Malang agar klien mendapat pelayanan yang sebaik baik dan sebenar benarnya.

3. Meningkatkan kinerja lembaga lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan, pada fungsi ini belum berjalan dengan semestinya karena berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis bahwa TKSK belum diberikan kuasa penuh dalam melakukan pembinaan terhadap PMKS maupun PSKS, dalam proses pembinaan, TKSK hanya dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima pembinaan, sedangkan proses pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya TKSK oleh dinas sosial belum diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten Malang. Sumbangsih TKSK dalam fungsi ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian diserahkan dan ditindak lanjuti oleh dinas sosial kabupaten Malang.

Pelaksanaan peran TKSK sebagai pekerja sosial di Kabupaten Malang sangatlah diperlukan dalam proses pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, Menurut Soekamto pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
2. Peranan tersebut seyogianya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. “Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut”.(Soekamto,2005:246)

Poin pertama sesuai dengan yang sudah ada di kabupaten Malang dimana dinas sosial kabupaten Malang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang ada di kabupaten Malang merekrut TKSK untuk diberi peran tertentu dalam meningkatkan misi pembangunan usaha kesejahteraan sosial. Pada poin kedua, teori tersebut juga sudah terlihat dari yang ada di Kabupaten Malang dimana individu yang diberi peran sebagai TKSK adalah individu yang dianggap masyarakat mampu dimana TKSK dipilih oleh camat setempat untuk kemudian diajukan kepada dinas sosial kabupaten dan propinsi, individu yang diberikan peran sebagai TKSK sudah memiliki keterampilan di bidang pekerjaan sosial karena diambil dari aktifis pada organisasi sosial di kecamatan atau desa setempat seperti karang taruna atau PSM sehingga hasrat dalam membantu dinas sosial dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang sudah tinggi. Pada poin tiga dan empat akan dibahas pada bagian selanjutnya.

4.3.3 Faktor yang mempengaruhi TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

4.3.3.1 Faktor Penghambat TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

Seperti yang disampaikan oleh Soekanto bahwa pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogianya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat

betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut. (Soekamto, 2005:246).

Pada poin pertama dan kedua sudah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa pada kedua poin tersebut sudah sesuai dengan yang ada di lapangan, yang akan dibahas pada bagian ini adalah pada poin ketiga dan keempat. Pada poin ketiga mengandung makna bahwa dalam menjalankan peran yang diemban ada beberapa peran yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga memerlukan pengorbanan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan perannya, dalam hal ini TKSK sebagai pemilik peran terkdang dalam menjalankan perannya menghadapi kesulitan atau hambatan hambatan dalam pelaksanaan perannya sebagai pekerja sosial dimana sesuai dengan yang disampaikan pada data yang sudah disampaikan peneliti bahwa kebanyakan TKSK di kabupaten mengaku kesulitan ketika terjadi perubahan cuaca dan kondisi geografis yang ada di kabupaten malang dimana jarak antar desa yang menjadi wilayah kerja TKSK tidak mungkin ditempuh tanpa menggunakan alat transportasi terutama ketika malan hari, sehingga untuk menanggulangi hambatan ini TKSK dengan sukarela menggunakan kendaraan pribadi dalam hal ini sepeda motor untuk menjalankan mobilitasnya, apabila dilihat dari pengorbanan yang dilakukan TKSK agaknya penghargaan dari dinas sosial atas

pengorbanan tersebut tidaklah setimpal dimana TKSK mendapat “uang lelah” yang disebut tali asih sebesar Rp250.000/bulan.

Pada poin keempat dikatakan bahwa apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut, pada poin ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan bahwa ketika TKSK menjalankan perannya sebagai pengumpul data jumlah PMKS yang ada wilayah kerjanya, para pemilik data terkesan menyembunyikan data tersebut, seperti yang ada pada data yang disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa data yang diberikan oleh pemilik data tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh para TKSK di wilayah kerjanya karena jumlah PMKS yang ada pada data yang diberikan pemilik data jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan oleh TKSK ketika melakukan survey. Ketidakterbukaan pemilik data dalam memberikan data pada TKSK sesuai dengan yang disampaikan oleh poin ini bahwa terkadang masyarakat dalam hal ini pemilik data terkesan membatasi peran yang dimiliki oleh individu, ketidakterbukaan pemilik data pada data yang diberikan pada TKSK disebabkan oleh pada pemilik data dalam hal ini kepala desa malu menyampaikannya karena akan dinilai desa yang dipimpinnya tidak berhasil.

2.3.2.1 Faktor Pendukung TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang

Adapun menurut (Kartasasmita, 1997:15-17) pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut :

Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus (1) ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, (2) ditingkatkan kualitasnya, agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hirarkis maupun fungsional, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasi-formal seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya. Pada poin ini sudah berjalan dengan semestinya dimana birokrasi dalam hal ini dinas sosial kabupaten malang sudah memberikan kewenangan kepada TKSK selaku pihak yang bekerja di lapisan terbawah masyarakat dan merupakan *local community organization* dalam mendukung kegiatan pertolongan untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang mereka temui di wilayah kerjanya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas daerah paling besar di provinsi Jawa Timur. Namun Kabupaten Malang juga merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Malang. Masih rendahnya akses pendidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadi banyak fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang.

Berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 155.745 jiwa, dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih sangat rendah. Oleh

karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangatlah strategis dalam menunjang usaha Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang karena bisa dikatakan TKSK adalah pihak yang paling mengetahui konsisi sesungguhnya keluarga miskin atau PMKS yang ada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan peran TKSK antara lain :

- a. Identifikator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan.
- b. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan sosial
- c. Menghubungkan orang dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, pada peran ini TKSK membantu klien agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan jejaring dengan

organisasi sosial yang ada di Kabupaten Malang agar klien mendapat pelayanan yang sebaik baik dan sebenar benarnya.

- d. Meningkatkan kinerja lembaga lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan, pada fungsi ini belum berjalan dengan semestinya karena berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis bahwa TKSK belum diberikan kuasa penuh dalam melakukan pembinaan terhadap PMKS maupun PSKS, dalam proses pembinaan, TKSK hanya dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima pembinaan, sedangkan proses pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial.
- e. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya TKSK oleh dinas sosial belum diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten Malang. Sumbangsih TKSK dalam fungsi ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian diserahkan dan ditindak lanjuti oleh dinas sosial kabupaten Malang.

- f. Komunikator, peran ini tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.

Dalam satu kecamatan di Kabupaten Malang terdapat beberapa kecamatan, dimana kecamatan-kecamatan tersebut merupakan wilayah kerja bagi tiap TKSK, karena dalam satu wilayah kecamatan hanya terdapat 1 TKSK, adapun hambatan hambatan bagi TKSK dalam tugasnya melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial antara lain :

- a. Transportasi
- b. Letak geografis dan cuaca
- c. Waktu
- d. Ketidaterbukaan pemilik data

Seperti diketahui diatas dalam melakukan usaha peningkatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang TKSK acap kali menemui hambatan-hambatan, oleh karena itu

TKSK memiliki beberapa pendukung demi menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai TKSK antara lain faktor pendukung fisik dan faktor pendukung non fisik antara lain berupa pelatihan, pemberian kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di wilayah kerjanya, motivasi,serta kedekatan TKSK dengan warga sekitar dan *Stakeholder*

5.2 Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan juga hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai pemecahan permasalahan yang ada bagi TKSK Kabupaten Malang dalam menjalankan perannya, adapun saran yang diberikan peneliti antara lain :

1. Sebaiknya dilakukan penambahan personil TKSK yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan peran TKSK dalam melakukan tugasnya sebagi TKSK yang ada di tiap Kecamatan sehingga nantinya juga akan mempermudah proses penyaluran bantuan dari pihak pemerintah, sehingga pada akhirnya diharapkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Malang dapat dikurangi secara perlahan-lahan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang lebih terangkat.
2. Sebaiknya pemberian tali asih ditambah lagi tiap bulannya demi menunjang kinerja TKSK agar lebih optimal dalam

penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Malang karena mengingat meobiltas dan ruang lingkup kerja TKSK yang sangat luas pemberian tali asih sebesar Rp 250.000 dirasa tidak bisa menopang semua aktifitas TKSK membantu Dinas Sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Malang.

3. Sebaiknya TKSK diikutkan dalam merumusan kebijakan serta pembinaan yang terkait dengan masalah PMKS di kabupaten malang karena TKSK bersentuhan langsung dengan penderita PMKS yang ada di wilayah kabupaten Malang khususnya yang ada di kecamatan dan desa wilayah kerja TKSK.
4. Ada baiknya TKSK dimasukkan dalam struktur dinas sosial kabupaten Malang, dari fakta yang ditemui di lapangan peran TKSK sangatlah menonjol, dapat dikatakan menonjol karena TKSK merupakan ujung tombak dinas sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Malang diaman TKSK lah yang paling mengetahui kondisi dan karakteristik PMKS yang ada di wilayah kerjanya, oleh karena itu alangkah baiknya jika TKSK dimasukkan dalam struktur kelembagaan dinas sosial kabupaten Malang bukan hanya sebagai mitra kerja.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto, 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Berry, David. 1982. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali
- Edy Suhardono, 1994. *Teori Peran: Konsep, Implikasi dan Derivasinya*; Pengantar Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Jakarta: PT Gramedia
- Edy Suhato, Ph.D., 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Redika Aditama
- Raho, Bernard SVD, 2003. *Keluarga Berziarah Lintas Zaman*. Flores: Nusa Indah.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Surjono, A. Dan Nugroho, T. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing
- Adi, R.I. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Sulistiyani, T.A. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media
- Sumarnonugroho. T. 1987. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: PT. Hanindita.
- Affifudin, sAg., M.si.2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta
- Dinas Sosial Kabupaten Malang, 2000. *Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Malang*, Malang : Dinas sosial Kabupaten Malang

- Koentjaraningrat, Fuad Hasan. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Balai Pustaka
- Nasir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Gramedia Indonesia
- Nanawi, I. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Usman, H. Dan Akbar, P.N. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.

Artikel Lain

- Kartasasmita, G. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Institut Teknologi Bandung, Bandung: disertai yang tidak dipublikasikan

Internet

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009, “tentang Kesejahteraan Sosial”, diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 dari <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/82>
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974, “Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial” <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/82>
- Jumlah PMKS. “Angka PMKS di Kabupaten Malang”, diakses tanggal 3 Novemb 2011 dari [http://www.malangkab.go.id/imgnews/RPJMD\(2\)](http://www.malangkab.go.id/imgnews/RPJMD(2)).
- “Wakil Rakyat” dari Pelosok , diakses tanggal 3 November 2011 dari <http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/16/wakil-rakyat-dari-pelosok/>
- Jumlah warga miskin. “Angka warga miskin di Jawa Timut”, diakses tanggal 3 November 2011 dari http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/.../brk_20100318233594_id.html

